

**PRAKISIS SOSIAL PEMBEBASAN KAUM TERTINDAS
(Studi Analisa Pemikiran Paulo Freire)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

ULFAH MARIYANAH

NIM : EO.13.99.098



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Ulfah Mariyanah ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, ... Januari .2004

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. Doekisno', written over the printed name below.

Drs. Doekisno, CH. W., M.Ag
NIP. 150 259 574

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Ulfah Mariyanah ini telah
dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Februari 2004

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



DR. Abdullah Khozin Affandi, MA.
Nip. 150 190 692

Ketua,

Drs. Loekisno CW, M.Ag.
Nip. 150 259 574

Sekretaris,

M. Syamsul Huda, M. Fil.I.
Nip. 150 278 250

Penguji,

Drs. Arifin Ridlwan
Nip. 150 245 898

DAFTAR ISI

ALAMAN JUDUL	i
ALAMAN PERSETUJUAN	ii
ALAMAN PENGESAHAN	iii
ALAMAN MOTTO	iv
ALAMAN PERSEMBAHAN	v
ALAMAN KATA PENGANTAR	vi
AFTAR ISI	viii



AB. I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	8
Penegasan Judul	8
Metodologi Penelitian	9
Alasan Pemilihan Judul	12
Kajian Pustaka	13
Sistematika Pembahasan	16

AB. II. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN PAULO FREIRE

Biografi Paulo Freire	17
Kondisi Sosial Politik Paulo Freire	19
Karya dan Pemikiran Paulo Frere	24

AB. III. KONSEP PRAKSIS SOSIAL PEMBEBASAN KAUM TERTINDAS

Sejarah Timbulnya Praksis Sosial	30
Konsep Paul Freire Tentang Praksis Sosial Pembebasan Kaum Tertindas	41
Kondisi Sosial Politik Indonesia	54
Kondisi Sosial Keagamaan Indonesia	65
Relevansi Praksis Sosial Freire Dengan Teologi Pembebasan	59

B. IV. ANALISA PEMIKIRAN PAULO FREIRE	75
B. V. KESIMPULAN	
Kesimpulan	87
Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Terbentang di hadapan kita bahwa dunia saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Manusia dan alam semesta tidak dipelihara, melainkan dirusak akibat keserakahan manusia. Kebersamaan telah diganti dengan kebencian dan balas dendam, kekerasan dan kekejaman. Keadilan dan kebaikan diganti dengan ketidakadilan, penindasan, dan pelecehan hak-hak asasi manusia. Keadilan tak dialami, terutama oleh kaum buruh, petani, nelayan, pegawai rendah, kaum perempuan, anak-anak dan para pengungsi.

Sedangkan, dalam masyarakat luas, ada rasa ketidakpastian hukum dan kemerosotan kepercayaan terhadap para penegak hukum. Perhatian terhadap kepentingan bersama lemah, dan kurang ada usaha yang serius untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sungguh masih kuat berperan pola pikir dan sikap hidup yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Praktik-praktik korupsi, suap, kolusi dan nepotisme sudah berakar dan melembaga dalam masyarakat kita.

Citra manusia yang bermoral semakin sirna dari masyarakat kita. Perlindungan dan pengembangan harkat manusia oleh sistem dan praktik politik yang bermutu rendah dan tidak mendewasakan. Semangat sukuisme, benturan nilai-nilai, gaya hidup tanpa moralitas, pengangguran, bentuk-bentuk perjudian, dan meluasnya

pengedaran serta penggunaan narkoba dan minuman keras, merupakan hambatan-hambatan terhadap pemeliharaan dan pemulihan hidup manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dalam kompleksitas masalah itu, apa pun yang terjadi, kita manusia yang menjadi korbannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung, karena manusialah yang menjadi sasarannya; tidak langsung, misalnya dalam hal pengrusakan lingkungan hidup, karena manusia jugalah yang harus memikul akibatnya. Dimana pun manusia diperlakukan tidak adil, ditindas, dilecehkan hak-hak asasinya, martabat manusia telah dirusak.

Realitas semacam ini bisa kita saksikan di negeri kita. Realitas penindasan seperti ini telah terjadi dalam jangka lama dan masyarakat cenderung diam menerima nasib, sehingga mereka akan terus tertindas secara kejam. Realitas sistem yang menindas ini bahkan sampai dirasakan dalam dunia akademis, hingga memunculkan pertanyaan tentang masih adakah kebebasan akademis di tengah pengekanan kebebasan itu.¹

Dari sinilah kemudian tindak kekejaman di mulai. Tindak kekejaman selalu dimulai dari mereka yang menindas, yang tidak mengakui orang lain sebagai manusia.²

Bila para elit politik dan aparatur negara masih terus pada pola lama yang menindas bisa menciptakan potensi konflik di antara warga bangsa sehingga bangsa ini akan terus dilanda kerusuhan.³ Dalam pola relasi yang menindas seperti ini

¹ Moh. Mahfud MD, *Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, ed. Eko Prasetyo, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 69

² Paulo Freire, *Pedagogy of Oppressed*, terj. Roam Topatimasang, dkk., *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 28

³ Benny Susetyo, *Orde Para Bandit*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 29

relevansi pemikiran Paulo Freire menampak ke permukaan. Paulo Freire secara optimistik memposisikan program praksis sosial sebagai sarana untuk mempersoalkan bentuk kekuasaan yang mapan.⁴ Di sinilah kita menemukan visi filosofis Paul Freire, yakni manusia yang terbebaskan.⁵

Melihat konteks realitas seperti ini, perlu adanya kesadaran melalui program praksis sosial pembebasan kaum tertindas sehingga lebih manusiawi. Dengan kata lain, diperlukan suatu program praksis sosial yang diarahkan pada pemanusiaan. Pemanusiaan, menurut pandangan aksiologis, selalu menjadi problema pokok manusia, dan kini persoalan itu harus dipedulikan sungguh-sungguh. Kepedulian terhadap pemanusiaan seketika membawa kita pada pengakuan terhadap dehumanisasi, yang bukan hanya kemungkinan ontologis melainkan sudah menjadi kenyataan historis.

Selagi manusia memahami sejauh manakah dehumanisasi itu, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah pemanusiaan merupakan kemungkinan yang akan lestari. Dalam sejarah, pemanusiaan maupun dehumanisasi merupakan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia sebagai makhluk yang belum utuh, yang sadar akan ketidakutuhan dirinya.

Meski keduanya merupakan alternatif, hanya pemanusiaan yang menjadi fitrah manusia. Fitrah ini selalu diinjak-injak, namun justru tiap kali diinjak ia makin

⁴ M. Escobar, dkk, (ed), *Dialog Bareng Paulo Freire: Sekolah Kapitalisme yang Licik*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 29

diteguhkan. Ia dikerdilkan lewat ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh penindas. Ia diteguhkan kembali melalui dambaan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta dikuatkan kembali lewat perjuangan kaum tertindas itu untuk memulihkan kembali kemanusiaan mereka yang telah hilang.⁶

Langkah awal, perjuangan untuk memulihkan kemanusiaan itu, bisa dilakukan dengan melakukan metode *conscientization* (penyadaran) untuk membangkitkan kesadaran rakyat atas realitas yang menindas mereka. Dan bangkitnya kesadaran rakyat menimbulkan dampak terhadap perubahan sosial. Tetapi kesadaran rakyat itu sekaligus membuat khawatir pihak militer dan regim yang berkuas. Melalui kesadaran ini akan lahir kritik-kritik terhadap sistem-sistem yang menyuburkan penindasan.

Pelajaran yang bisa ditarik dari pemikiran Freire untuk konteks praksis sosial pembebasan paling tidak adalah komitmennya terhadap kaum marjinal. Lewat perspektif Freire kita bisa bertanya: kepada siapa sesungguhnya sistem politik saat ini berpihak? Apakah negara sudah sungguh-sungguh mengamalkan salah satu pasal UUD 1945 kita yang berbunyi "anak-anak telantar dipelihara oleh negara"? Mengapa ada kesenjangan yang luar biasa tinggi dalam negara?

⁵ Paulo Freire, *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, terj. Agung Prihananto dan Fuad Arif Fudiyartanto, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 13

⁶ Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan, Pendidikan Yang Memanusiakan, dalam Menggugat pendidikan: Fundamentalitas, Konservatif, Liberal, Anarkis*, ed. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 435.

Membiarkan kesenjangan itu terus berlangsung sama dengan membenarkan negara hanya berfungsi sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat dominan dalam rangka mempertahankan dan mereproduksi status quo. Di sinilah pentingnya program praksis sosial yang mampu menyadarkan bahwa pemaksaan dan penindasan itu tidak hanya mengenai hal fisik dan luaran, tetapi merasuk dan membatinkan sampai ke dalam kesadaran manusia.

Justru di kedalaman itulah diri manusia paling disetir dan diperalat oleh kekuasaan para penindas yang sebelumnya tak disadarinya. Kekuasaan digunakan oleh masyarakat yang tidak berkeadilan untuk memaksa dan mengorbankan fisik manusia, sedangkan mitos-mitos sosial dan konsep-konsep distortif tentang kehidupan manusia menjustifikasi dan merasionalisasi pemaksaan tersebut.⁷

Maka, tak ada tugas dasarnya lain bagi praksis sosial pembebasan kecuali membantu manusia untuk membebaskan diri dari penindasan yang tak disadarinya itu. Mengkritisi sistem politik yang menindas akan membantu kita untuk menyadari betapa kehidupan politik nasional telah banyak menyeleweng dari tugasnya yang paling dasar, yakni membantu warga masyarakat menjadi manusia yang bebas dan merdeka.

Praxis sosial adalah dasar yang tak boleh ditawar dalam demokrasi. Maka, janganlah kita bermimpi demokrasi akan dengan sendirinya terjadi jika kita tidak

⁷ William A. Smith, *The Meaning of Conscientizacao, The Goal of Paulo Freire's Pedagogy*, terj. Agung Prihantoro, *Conseintazacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 2

mengusahakan suatu sistem politik yang membebaskan manusia untuk dapat menjadi dirinya, dan dengan demikian juga menghargai orang lain untuk dapat menjadi dirinya sendiri. Perpektif Freire sangat relevan apabila kita kontekskan dengan Indonesia. Sebab, titik tolak gagasan Freire adalah kenyataan sosial di Brasil, di mana penindasan bercokol dengan mudah karena ketidaktahuan dan proses pembodohan oleh penguasa.

Pada tahun 1960-an, hampir separuh penduduk di jamannya Freire, sangat bodoh dan tak bisa memahami realitas penindasan. Di tengah lautan ketidaktahuan para politisi bermain (dan mempermainkan) rakyat dan akhirnya mampu mempertahankan penindasan yang hebat. Praksis sosial tak dapat dipisahkan dari penyadaran (*conscientização*), yang akhirnya bermuara pada pembebasan. Dalam keadaan carut-marut seperti sekarang, sudah saatnya kita berpikir tentang membangun kembali kehidupan sosial sebagai bagian dari gerakan rakyat.

Sudah saatnya pemerintah berbesar hati mengakui keterbatasannya, dan mundur dari pengelola yang otoriter menjadi lembaga pemberi fasilitas dan pengakuan kepada usaha-usaha rakyat membangun kehidupannya yang lebih humanis. Dalam alam pikir Freire, manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran waktu, yang berarti manusia itu memiliki historisitas, kepekaan sejarah. Manusia ada dalam waktu. Manusia menjadi temporal, tidak dilumat oleh kekinian, tidak permanen dalam 'hari ini'. Manusia yang temporal ini adalah manusia yang mampu berintegrasi dengan lingkungannya.

Namun, manusia lebih banyak yang tertindas, tak sedikit yang berhenti menjadi ekstremis dalam melawan status quo, dan pasrah dikuasai oleh mitos-mitos perubahan itu sendiri. Pemikiran dan praksis-praksis sosial yang melawan mistifikasi. Freire memaknainya sebagai kesadaran kritis untuk memilih dan mengubah realitas. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat eksistensi manusia yang merupakan suatu tugas praksis.⁸

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka persoalan pokok tersebut akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana praksis sosial?
2. Bagaimana konsep praksis sosial pembebasan kaum tertindas Paulo Freire?
3. Bagaimana implikasi konsep praksis sosial pembebasan kaum tertindas Paulo Freire terhadap masyarakat Indonesia?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁸ Dennis Collins, *Paulo Freire: His Live, Works and Thought*, terj. Henry Heyneardhi dan Anastasia P, *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 82

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep Paulo Freire tentang praksis sosial pembebasan kaum tertindas.
- b. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya gagasan praksis sosial pembebasan kaum tertindas Paulo Freire.
- c. Untuk menawarkan solusi terbaik terhadap permasalahan penincasan atas hak-hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

D. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, berikut penjelasan singkat, antara lain;

- a. Praksis sosial adalah aksi nyata untuk membebaskan kaum atau warga masyarakat yang fitrahnya diinjak-injak, dikerdilkan lewat ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh penindas. Agar aksi sosial ini lebih bermakna, maka kaum tertindas harus mengusahakan, memperoleh kembali kemanusiaan mereka, jangan sampai berubah menjadi penindas kaum tertindas, melainkan mereka harus memanusiakan kembali keduanya.
- b. Pembebasan adalah aksi atau program nyata yang direalisasikan untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang tertindas atau terkungkung suatu keadaan, menjadi merdeka, mandiri, tidak terikat dalam keadaan yang

mendominasi dirinya, atau lebih jelasnya, si tertindas itu bisa meloloskan diri dari dominasi itu.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- c. Kaum tertindas adalah mereka yang selalu dimarginalisasi dan dirampas hak-hak sosial dan politiknya oleh kaum penindas.
 - d. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah.⁹
 - e. Analisa adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

E. Metode Penelitian

Sebagai sumber analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu di masa lampau, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan tersebut digunakan mengingat salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hidupnya.¹⁰

a. Sumber data

Mengingat studi ini seluruhnya bersifat kepustakaan, sumber tersebut antara lain:

⁹ Departemen P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hal 965.

1. Sumber Primer

- a. Buku berjudul "*Pendidikan kaum tertindas*" terjemahan dari *Pedagogy of the Oppressed*" karya Paulo Freire.
- b. Buku berjudul "*Politik Pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan*" terjemahan dari *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*.
- c. Buku berjudul "*Menggugat Pendidikan; Fundamentalisme, Konservatif, Liberal dan Anarkis*."

2. Sumber Sekunder

- a. Buku berjudul "*Conscientizacao, Tujuan Pendidikan Paulo Freire terjemahan dari "The Meaning of Conscientizacao the Goal of Paulo Freire's Pedagogy"*" karya William A. Smith.
- b. Buku berjudul "*Sekolah Kapitalisme yang Licik*" karya Miquel Escobar,dkk.(Ed),
- c. Buku berjudul "*Pemikiran revolusioner dalam Pendidikan yang Membelenggu dan Membebaskan*", karya Khozin.
- d. Dan lain-lain.

b. Teknik Penggalan Data

Data yang diperlukan dalam studi kepustakaan ini digali dari sumbernya melalui riset kepustakaan (*library Research*) yaitu mempelajari dan menelaah secara

¹⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 62.

mendalam kandungan karya dari Paulo Freire, dalam terjemahan Indonesia yang termuat dalam sumber primer. Di samping itu, peneliti juga mempelajari dan menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah terhimpun dibahas dan dianalisis.

c. Metode Analisis

Dalam menganalisa data yang telah terhimpun, penulis menggunakan analisis *kualitatif* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, referensi dan keseragaman satuan atau kelompok.

2. Pengorganisasian

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan.

3. Penemuan Hasil

Tahapan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran yang dikemukakan dalam perumusan masalah tersebut di atas.

4. Metode Pembalasan

Pada penelitian ini, metode pembahasan yang digunakan adalah metode *diskriptif-analitis*. Metode ini digunakan untuk memaparkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang dihasilkan seorang tokoh, kemudian melakukan analisa.

F. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian berjudul **"Praxis Sosial Pembebasan Kaum Tertindas"** (*Studi Analisa Pemikiran Paulo Freire*) dipilih dengan alasan karena Paulo Feire adalah seorang Teolog, Humanis, Sosialis, dan bahkan dianggap mesias dunia ketiga. Ia tidak hanya seorang kontroversial dengan metode berpikirnya yang revolusioner. Pemikirannya selalu mencerminkan nada gugatan, protes dan berontak terhadap segala bentuk penindasan sesama manusia yang telah kehilangan kesadaran kritisnya.

G. Kajian Pustaka

Literatur utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku Berjudul *“Pendidikan Kaum Tertindas”*. Buku ini terjemahan dari *Pedagogy of the Opposed*, yang merupakan karya Paulo Freire. Buku ini banyak menjelaskan tentang situasi ketertindasan masyarakat sipil saat itu.

Keterlibatannya secara langsung pada situasi penindasan orang miskin telah membimbingnya ke arah penemuan apa yang kemudian digambarkan sebagai kebudayaan bisu di kalangan orang yang tertindas. Dalam buku ini dijelaskan, kebodohan dan kelalaian mereka adalah akibat langsung dari situasi perekonomian sosial dan pengekangan politik dimana kaum tertindas menjadi korban-korbannya. Masyarakat tertindas tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk memahami dan menjawab realitas-realitas konkrit dari dunia mereka, melainkan tetap saja tenggelam dalam suatu keadaan dimana kesadaran kritis dan jawaban semacam itu praktis tidak mungkin.

Dalam pandangan buku ini dijelaskan, keseluruhan sistem yang ada merupakan salah satu perekat utama kebudayaan yang menindas itu. Sebagai langkah solusi atas ketertindasan manusia, maka langkah aksi sosial yang harus dilakukan adalah penyadaran akan realitas penindasan dengan menanamkan budaya kritik terhadap sistem yang menindas. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal menciptakan kesadaran kritis di kalangan kaum tertindas sehingga bisa tercipta suatu tatanan masyarakat baru yang kritis terhadap realitas penindasan.

Buku berjudul "*Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*" juga akan menjadi rujukan utama. Buku ini merupakan terjemahan dari *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, karya Paulo Freire. Dalam buku ini Freire banyak menjelaskan bahwa apapun alasannya, penindasan merupakan fenomena sosial yang tidak manusiawi dan menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).

Dehumanisasi itu bersifat berganda, dalam artian, terjadi atas diri minoritas kaum tertindas dan juga atas diri kaum penindas. Kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka diingkari oleh kaum penindas. Kaum tertindas tidak bisa berbuat banyak menghadapi situasi itu karena mereka sengaja dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam kebudayaan bisu. Kaum yang melakukan penindasan pun menjadi tidak manusiawi karena telah mengingkari hakekat keberadaan dan hati nurani dengan memaksakan terjadinya penindasan terhadap sesama manusia.

Oleh karena itu dijelaskan dalam buku ini, agenda memanusiaikan kembali manusia (humanisasi) merupakan suatu keniscayaan. Humanisasi satu-satunya pilihan mutlak bagi kemanusiaan yang telah mengalami penyimpangan. Dari sinilah kemudian pentingnya dirumuskan hakekat praksis sosial pembebasan dalam suatu dimensi yang sama sekali baru. Dimensi baru itu terutama orientasi penyadaran kepada realitas penindasan. Penyadaran terhadap realitas itu harus bersifat subyektif dan obyektif. Kebutuhan obyektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subyektif (kesadaran subyektif) untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi yang terjadi secara obyektif. Dalam

konteks seperti ini maka obyektifitas dan subyektifitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Akan tetapi keduanya memiliki fungsi dialektis yang konstan dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang harus dikritisi secara terus menerus.

Buku berjudul "*Sekolah Kapitalisme Yang Licik*" akan jadi rujukan dalam melacak pemikiran Freire. Buku karya M. Escobar, dkk. ini lebih berfokus pada pemikiran Freire yang membahas hubungan antara peran hegemoni dalam formasi intelektual, serta dalam konteks formasi sosial politik yang lebih luas.

Di sinilah kemudian dijelaskan pentingnya memahami relasi antara praksis sosial pembebasan, kekuasaan dan politik. Praksis sosial itu diformulasikan untuk melawan proses pelestarian ideologi dominan, guna mempertahankan kekuasaan yang menindas. Praksis sosial pembebasan yang revolusioner, justru harus mengagendakan proses reproduksi ideologi tandingan untuk memfungsikan proyek penyadaran sebagai sarana pembebasan kaum tertindas.

Dan seperti dijelaskan Paulo Freire dalam buku "*Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*", maka kaum tertindas harus bangkit untuk selalu melakukan gugatan, protes, dan berontak terhadap segala bentuk penindasan.

Bahkan di dalam buku "*Conscientizacao : Tinjauan Pendidikan Paulo Freire*", dijelaskan bahwa upaya memanfaatkan institusi formal untuk agenda penyadaran telah menjadi agenda di seluruh dunia. Dan untuk mengukur sejauh mana efektifitas program penyadaran atas realitas penindasan diperlukan suatu alat ukur sejauh mana

tingkat kesadaran dalam situasi tertentu sebelum dan sesudah dilakukan program penyadaran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

23 Luncas Juni 74 Ape

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan penelitian ini selanjutnya akan diuraikan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dalam memahami pokok-pokok permasalahan. Pembahasan dalam Bab ini meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Variabel Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi pemikiran Paulo Freire dan karya-karyanya. Sedang pokok pembahasannya meliputi masa kehidupan (sejarah) Paulo Freire, kondisi sosial-politik dan karya-karyanya.

BAB III : Bab ini merupakan konsep praksis sosial pembebasan kaum tertindas Paulo Freire yang diuraikan secara umum meliputi definisi, sejarah timbulnya, serta faktor-faktor yang melatar belakanginya.

BAB IV : Bab ini menguraikan analisa terhadap konsep-konsep yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir penelitian tentang Praksis Sosial Pembebasan Kaum Tertindas. Dengan demikian dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sebagai kesimpulan, dan implikasinya terhadap kegiatan keilmuan.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN PAULO FREIRE



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi Paulo Freire

Paulo Freire dilahirkan pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Timur Laut Brazil. Dia berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang tentang Ayahnya Joachim Themistocles Freire dan Ibunya Edeltrus Neves Freire.¹ Merekalah, katanya yang dengan telaten dan kasih mengajarnya untuk menghargai dialog dan menghormati pilihan orang lain. Orang tuanya berasal dari golongan menengah namun mengalami kesulitan finansial yang parah selama masa depresi besar. Karena itulah Freire sangat menyadari apa artinya lapar bagi anak sekolah dasar.

Pada tahun 1931 Paulo Freire beserta seluruh keluarganya pindah ke Jabotao dan di kota inilah kemudian ayahnya meninggal dunia. Menurut Prof. Richard Shaull, pada tahap ini Freire memutuskan untuk mengabdikan hidupnya "Perjuangan Melawan Kelaparan" sehingga tidak ada anak lain yang mengalami penderitaan yang ia rasakan.

Kemampuannya di sekolah pada usia lima belas tahun (dua tahun di belakang kelompok umurnya di kelas) sekedar cukup untuk memenuhi syarat masuk ke sekolah lanjutan. Namun setelah keadaan keluarganya sedikit membaik, ia dapat menyelesaikan sekolahnya. Ia kemudian memasuki Universitas Recife. Di Universitas tersebut ia masuk ke Fakultas Hukum sembari mempelajari Filsafat

dan Psikologi Bahasa. Ia juga bekerja paruh waktu sebagai seorang instruktur bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan.

Paulo Freire lulus dari Universitas Recife di Pernambuco dan memperoleh gelar sarjana di bidang hukum. Setelah bekerja sebagai pengacara sebentar, ia hanya mencoba satu kasus pada tahun 1946, ia menerima sebuah posisi Layanan Sosial Industri, sebuah lembaga yang didirikan di Recife oleh sektor swasta yang bertujuan reformis. Freire bekerja selama delapan tahun di SESI. Pada tahun 1959, ia melamar posisi akademis sebagai ketua jurusan sejarah dan filsafat di Universitas Recife. Sesuai dengan sistem Brazil untuk pengangkatan Profesor yang diorganisasikan sesuai dengan sistem Jerman, Freire menulis disertasi berjudul "Pendidikan dan Realitas Brazil" dengan memperoleh persamaan doktor namun kehilangan posisi akademisnya (asisten fakultas di tingkat universitas) menjadi direktur pertama pada Service Extension pada Universitas Recife.²

Pada tahun 1944, Freire menikahi Elza Maia Olivera dari Recife, seorang guru sekolah dasar yang kemudian menjadi seorang kepala sekolah. Elza memberinya tiga orang putri dan dua orang putra. Kiprah Freire menarik perhatian nasional ketika pada tahun 1983 dia ditunjuk sebagai direktur Nasional *Program for Literacy Training*. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Joao Coulard yang merakyat.

Kudeta 1964 mengakhiri eksperimen pelatihan pemberantasan buta huruf tersebut. Freire meringkuk dalam penjara selama tujuh puluh hari dan akhirnya

¹Denis Collins, *Paulo Freire, His Life, Works and thought*, terj. Henry Heyneardi dan anastaia P, *Paulo Freire, kehidupan Karya dan Pemikirannya*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002) hal 6.

dibuang. Dia baru kembali ke Brazil tahun 1980. Freire sudah mengajar di universitas-universitas Brazil sebelum tahun 1964. Dalam pengasingan, meskipun ia mengajar di seluruh dunia, ia hanya bekerja secara marginal dengan universitas, kadang-kadang mengajar, seperti di Harvard selama satu semester tahun 1969 atau di universitas jenewa secara sporadis dari tahun 1970 sampai 1979.

Sekembalinya ke Brazil tahun 1980, Freire mendapatkan posisi akademis di Universitas Campinas dan Universitas Katolik, keduanya di Sao Paulo. Selain pengalaman dan reputasinya, baru dua belas tahun terakhir Freire menjadi seorang akademisi yang terlibat penuh dalam dunia akademis.

B. Kondisi Sosial Politik Paulo Freire

Paulo Freire adalah sosok kontroversial dengan metode berpikirnya yang kritis. Ia juga bisa dikatakan seorang Teolog, Humanis, Sosialis dan bahkan dianggap sebagai mesias dunia ketiga (khususnya Amerika Latin), serta sosok yang sulit diterka. Pemikiran kritisnya selalu bernada gugatan, protes, berontak terhadap segala bentuk budaya yang telah mencerabut manusia dari kesadarannya.

Latar belakang kehidupannya dengan cengkraman kemiskinan yang melanda negaranya (Brazil), di mana dia hidup dalam budaya penindasan dan kebudayaan bisu, serta pengalaman hidupnya yang akrab dengan kemiskinan serta kelaparan mendorongnya untuk berjanji akan bekerja di antara kaum miskin dan mencoba memperbaiki nasib hidup mereka. Ia berkeyakinan bahwa kelak

² M.Escobar,dkk, (ed), *Dialog Bareng paulo Freire. Sekolah Kapitalisme yang Licik*, Penerj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta;LkiS. 2000), hal 16.

semua laki-laki dan perempuan dapat sungguh-sungguh menjadi manusia dan merdeka sebagaimana dikehendaki penciptanya.

Sejarah Brazil dan evolusinya dari kolonialisme, perjuangan rakyat melawan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil yang berkuasa dan akhirnya ketergantungan pada modal asing dan perekonomian asing pada abad dua puluh, tidak jauh berbeda dengan sejarah negara lain di Amerika latin. Dalam negara yang menggunakan bahasa Spanyol dan Brazil itu, kebudayaan dan nilai-nilai agama Eropa telah diasimilasikan dan difusikan dengan kebudayaan asli Indian. Saat ini hegemoni Eropa telah digantikan oleh pengaruh-pengaruh dari Amerika Utara, namun situasi ketergantungan Amerika Latin kepada kebudayaan asing belum berubah. Paulo Freire dilahirkan dalam budaya ketergantungan yang melebihi realitas ekonomi dan politik. Sastra, kesenian, agama dan kebiasaan-kebiasaan keluarga Amerika Latin adalah campuran pola kehidupan orang Eropa dan penduduk asli (Indian) Amerika yang ikut mewarnai pemahaman Freire terhadap *Conscientizacao*.³

Di awal tahun 1960-an Brazil adalah sebuah negara yang bergejolak. Banyak gerakan reformasi tumbuh pada saat yang bersamaan, karena golongan sosialis, komunis, mahasiswa, pimpinan buruh, golongan populis dan militan Kristen, semua mengejar tujuan sosial politiknya masing-masing. Pada waktu itu Brazil berpenduduk sekitar 34,5 juta jiwa, dan hanya 15,5 juta orang saja yang dapat memberikan suara. Buta aksara yang banyak terdapat pada masyarakat pedesaan miskin (khususnya di daerah Timur laut tempat Freire bekerja) menjadi

³ Denis Collin, *Paulo Freire, Kehidupan, Karya dan Pemikirannya.....*51-52.

daya tarik bagi golongan minoritas karena hak pemberian suara seseorang tergantung pada kemampuan baca tulisnya.

Tidaklah mengherankan bahwa setelah pemimpin populis Joao Goulart menggantikan Janio Quadros sebagai presiden Brazil pada tahun 1961, serikat petani dan gerakan kultural lain yang terkenal bermaksud untuk membangkitkan kesadaran dan kampanye melek huruf di seluruh negeri, seperti juga peningkatan kegiatan Basic Education Movement (BEM) yang didukung para uskup Brazil. Melalui *Superintendency for the Development of the North East* (SUDENE), organisasi federal pemerintah di bawah arahan Celso Furtado, program-program untuk membantu perkembangan perekonomian di sembilan negara bagian memasukkan kursus-kursus dan beasiswa untuk pelatihan para ilmuwan dan kemudian direncanakan untuk memperluas program-program melek huruf dasar dan orang dewasa sebagai hasil restrukturisasi radikal yang diimpikan SUDENE.

Di tengah harapannya yang sedang berkejang inilah Paulo Freire menjadi kepala pada *Cultural Extension Service* yang pertama di Universitas Recife, yang membawa program melek hurufnya yang sekarang terkenal dengan metode Freire kepada Petani di Timur Laut.

Praxis sosial Freire yang terkenal secara internasional berawal pada akhir tahun 1940 dan terus berlangsung sampai tahun 1964, ketika ia ditahan di Brazil lantaran program pemberantasan buta huruf yang dirancang dan dilaksanakannya pada tahun 1962, sebagai langkah awal untuk menciptakan kesadaran kritis masyarakat Brazil.

Dia dipenjarakan oleh pemerintah militer selama tujuh puluh hari dan dibuang karena kiprahnya dalam kampanye pemberantasan buta huruf. Dalam program ini, ia bertindak sebagai direktur. Enam belas tahun dalam pengasingan Freire merupakan saat yang sangat menggemparkan dan produktif. Dia diperintahkan meninggalkan negerinya dan kemudian pergi ke Chili. Selama lima tahun di Chili, dia menghabiskan waktunya sebagai konsultan UNESCO bersama dengan *Chilean Agrarian Reform Corporation*, terutama *Reform Training and Research Institute*.

Pada tahun 1969 ia ditempatkan di *Harvard University's Center for Studies in Development and Social Change*. Tahun 1970 ia pindah ke Jenewa, Swiss, menjadi konsultan pada *Office of Education of the World Council of Churches*. Di sana, ia mengembangkan program pemberantasan buta huruf untuk Tanzania dan Guinea Bissau yang memfokuskan pada peng-Afrika-an negara itu. Freire juga melakukan pengembangan program pemberantasan buta huruf di beberapa negara bekas jajahan Portugis pasca revolusi seperti Angola dan Mozambik, membantu pemerintah Peru dan Nikaragua dalam kampanye pemberantasan buta huruf; membangun lembaga aksi Budaya di Jenewa tahun 1971; kembali ke Chile setelah Salvador Allende dibunuh 1973; memprovokasi jenderal Pinochet sehingga menyatakan Freire sebagai subversif; dan akhirnya kembali ke Brazil pada tahun 1980 untuk mengajar di Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo dan Universidade de Campinas de Sao Paulo.⁴

⁴M. Escobar, dkk, (ed), *Dialog Bareng Paulo Freire*.....xii.

Dia dipenjara oleh pemerintah militer selama tujuh puluh hari dan dibuang karena kiprahnya dalam kampanye pemberantasan buta huruf. Dalam program ini, ia bertindak sebagai direktur. Enam belas tahun dalam pengasingan Freire merupakan saat yang sangat menggemparkan dan produktif. Dia diperintahkan meninggalkan negerinya dan kemudian pergi ke Chili. Selama lima tahun di Chili, dia menghabiskan waktunya sebagai konsultan UNESCO bersama dengan *Chilean Agrarian Reform Corporation*, terutama *Reform Training and Research Institute*.

Pada tahun 1969 ia ditempatkan di *Harvard University's Center for Studies in Development and Social Change*. Tahun 1970 ia pindah ke Jenewa, swiss, menjadi konsultan pada *Office of Education of the World Council of Churches*. Di sana, ia mengembangkan program pemberantasan buta huruf untuk Tanzania dan Guinea Bissau yang memfokuskan pada peng-Afrika-an negara itu. Freire juga melakukan pengembangan program pemberantasan buta huruf di beberapa negara bekas jajahan Portugis pasca revolusi seperti Angola dan Mozambik, membantu pemerintah Peru dan Nikaragua dalam kampanye pemberantasan buta huruf; membangun lembaga aksi Budaya di Jenewa tahun 1971; kembali ke Cile setelah Salvador Allende dibunuh 1973; memprovokasi jendral Pinochet sehingga menyatakan Freire sebagai subversif; dan akhirnya kembali ke Brazil pada tahun 1980 untuk mengajar di Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo dan Universidade de Campinas de Sao Paulo.⁴

⁴M. Escobar, dkk, (ed), *Dialog Bareng Paulo Freire*.....xii.

Lima tahun berlalu sejak pembuangan Freire dari Brazil, dia menetap di Jenewa dengan istrinya. Anak-anaknya hampir, jika tidak, semuanya telah menikah. Dia menjabat sebagai konsultan pada Gereja-gereja dunia, memberikan kuliah dan mencurahkan usaha-usaha untuk membantu program penyadaran kritis warga di negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka, seperti Tanzania. Dia juga menjabat sebagai ketua dalam komite eksekutif di *Institut Action Cu'turelle* (IDAC) yang bermarkas di Jenewa. IDAC adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh orang-orang yang ingin mengajar, lewat penelitian dan eksperimen, untuk memberikan kesadaran atas realitas sosial.

Selain menjalankan penelitian dan mensponsori workshop-workshop serta program-program lain yang melibatkan penyadaran, sejak 1973 IDAC terus mempublikasikan sejumlah dokumen yang mendukung ide-ide Freire dan menerapkan pada isu-isu pembebasan dan humanisme di seluruh dunia.

Freire sedikit menyadari bahwa pada 15 November 1988 Partido dos Trabalhadores (Partai Buruh PT) akan memenangkan pemilihan dewan kota di Sao Paulo, Brazil dan ia dipilih sebagai salah satu pejabat penting kota Sao Paulo oleh Mayor Luiza Erundina de Sausa. Dalam posisinya itu Freire banyak melakukan kritik keras terhadap borjuisme sebagai langkah untuk “menyelamatkan” mereka yang tinggal dalam situasi domestika baru ketika mereka diperkenalkan kembali dengan kondisi tekanan mereka sendiri –praxis solidaritas Freire, yaitu penyadaran kritisnya, berbicara tentang suatu cara baru mewujudkan dan menjadi manusia.

“Cara mewujudkan dan menjadi” ini merupakan suatu pencarian demi realitas diri historis orang-orang tertindas oleh mereka sendiri melalui pembentukan agen-agen pemberontakan kolektif. Lalu tidak mengejutkan ketika Freire berhadapan dengan perspektif yang berasal dari pusat metropolitan yang dirancang untuk melayani dan melindungi status quo kaum borjuis. Akibatnya, karya Freire sampai sekarang tidak diterima oleh kaum borjuis dan dianggap sebagai bacaan terkutuk, lalu diejek dan disingkirkan ke pinggiran perdebatan. Pelarangan, tuduhan subversif dan menghasut secara politis terhadap karya Freire bisa dipahami bila dikaitkan dengan konteks historis dewasa ini, walaupun itu bukanlah suatu yang niscaya.

C. Pemikiran dan Karya Paulo Freire

Freire tertarik pada praksis sosial pembebasan dari ketertindasan melalui penyadaran nalar kritis, saat ia mulai mempertahankan ketidaksesuaian antara khotbah gereja dengan kenyataan sehari-hari. Buku pertama Freire adalah *Educação como Prática da Liberdade* di terbitkan di Brazil tahun 1967. Terjemahannya dalam bahasa Inggris muncul tahun 1973, yaitu *Education as the Practise of Freedom*, dan buku *Pedagogy of the Opressed* (1970), dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “*Pendidikan Kaum Tertindas*”, ini merupakan karya pertamanya yang diterbitkan di Amerika Serikat,⁵ dan kemudian Freire selalu dikaitkan dengan “*Pedagogy*”. Dan di sinilah ia mulai mendapatkan perhatian di mana-mana termasuk di Indonesia.

Pada tahun 1973 terbit sebuah essaynya yang sangat monumental yaitu *Extention o Comunicacion*. Di dalamnya berisi suatu pandangan filosofis tentang apa yang dapat terwujud dari para lelaki dan perempuan, jika mereka dimungkinkan untuk mentransformasikan sejarah dan menjadi subyek-subyek melalui suatu refleksi yang kritis. Freire membandingkan kemungkinan ontologis.

Karya Freire di atas juga menggambarkan berbagai metode menyikapi masalah yang digunakan Freire dan timnya di Brazil. Sebuah apendik juga menyajikan gambar-gambar ilustrasi yang digunakan tim Freire yang melahirkan kodifikasi hubungan antara manusia dan dunia, kemudian menyajikannya keadaan para petani untuk didiskusikan. Diskusi tersebut juga menyajikan kata-kata “generatif” (seperti gubuk, bajak, kumuh, sekolah dan lain-lain) untuk dipelajari orang-orang itu saat membaca dan menulis.

Pemilihan kata-kata generatif ini didasarkan pada hasil investigasi dan diskusi tentang kehidupan di tiap-tiap daerah. Kata-kata tersebut disebut generatif karena ada dua alasan yaitu; (1) karena kata-kata itu dapat mendorong diskusi masalah-masalah yang akrab tentang kepentingan sehari-hari dari orang-orang yang buta huruf tadi, dan (2) karena dalam bahasa Romawi kata-kata yang bersuku kata banyak dengan mudah dipisah-pisahkan ke dalam komponen-komponen suku kata mereka dan kemudian digunakan untuk membentuk kata-kata baru.

Dengan menggunakan kata-kata generatif yang dapat dirubah-rubah para petani cepat belajar membaca. Selain itu juga mengarah pada kehidupan dan

⁵Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Terj, Mansour Fakih, dkk, *Pendidikan kaum*

budaya manusia sebagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh orang-orang itu: kelaparan, ketergantungan, pengangguran dan lain-lain. Gambaran tentang metode Freire terdapat dalam berbagai bahasa yang banyak dikumpulkan oleh pengarang baku. Dalam karya *Education and Conscientization* adalah materi yang terbaik yang dapat memberikan penerangan bagi mereka yang menyelidiki asal-usul metodenya dalam memberikan kesadaran kritis atas realitas sosial yang menindas.

Pada tahun 1969-1970 ia menerbitkan dua buah artikel untuk *Harvard Educational Review* yang berjudul "*Adult Literacy Processes Cultural Action for Freedom dan Cultural Action and Conscientization*" kedua makalah tadi merangkum hampir semua pemikirannya dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya, karena karya-karya tulis sebelumnya selalu dalam bahasa Spanyol atau Portugis. Artikel yang sama juga diterbitkan dalam penerbitan bersama antara *Harvard Educational Review* dan *Centre for Study of Development and Social Change* dalam sebuah booklet yang berjudul *Cultural Action for Freedom*.

Dalam booklet tersebut terdapat pendahuluan yang ditulis Freire yang mencerminkan pandangannya bahwa tema-tema alienasi, dominasi, dan penindasan yang melambungkan dunia orang-orang buta huruf dan tidak memiliki tanah ditemukan dalam budaya bisu yang total dan juga dalam sub budaya dari dunia pertama. Karyanya ini menyatakan kembali tesisnya bahwa tidak ada realitas sosial yang netral dan penyadaran kritis harus menjadi tindakan kultural untuk pembebasan.

Tertindas, (Jakarta: LP3ES, 1995) hal xii.

Cultural action for Freedom kembali diikuti dengan penerjemahan bukunya yang paling terkenal *Pedagogy of the Opressed*. Di sini disebutkan bahwa humanisasi dari ketertindasan akan berhasil jika ia dijadikan suatu proses kemanusiaan yang dijalankan oleh dan dengan, tidak untuk bagian yang lebih besar dari umat manusia. Keberadaan budaya ketergantungan diperlukan (namun secara dialektis di tentang) demi keberadaan elit-elit yang dominan yang mempunyai kekuatan politik dan ekonomi. Orang-orang yang didominasi adalah mereka yang tertindas, dan mungkin benar bahwa mereka kebetulan miskin, namun mereka tidak dibedakan secara spesifik oleh kemiskinan mereka tetapi karena hilangnya mereka untuk menetapkan sejarah mereka sendiri.

Freire memperkenalkan perlunya humanisasi bagi kaum tertindas. Humanisasi adalah jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka dan melalui praksis merubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan.

Membaca karya Freire dan tiba pada gagasan bahwa ia hanyalah seorang neo marxis yang lain. Analisis sejarah dan budayanya sangat condong pada pemikiran Marx dan Mao, dari pemikiran Fanon, Lukacs, Althuser dan Mercuse, namun pemikiran filsafatnya tidak pernah mengarah kepada aliran manapun. Pemikirannya mengalir pada pengalaman-pengalaman hidupnya dan bersifat dialektis, sebuah sintesis dari penyaringan pemikiran-pemikiran yang

membawanya pada kesimpulan bahwa penyadaran kritis harus mengarah pada pembebasan politis.

Karena Sinkretismenya (penyatuan aliran-aliran) ia disebut sebagai seorang idealis, komunis bahkan seorang teolog yang menyamar, Fenomenolog, dan seorang eksistensialis. Kemampuan Freire untuk memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang bervariasi dan hanya mungkin dapat menjelaskan kepopulerannya di antara orang-orang yang sangat berbeda sudut pandang jika tidak disebut berlawanan dengan dirinya.

Para kolegenya di IDAC (*Institute Action Culturelle*) mengarahkan perhatian mereka kepada filsafatnya yang beraneka warna dan dampak-dampaknya terhadap para pembacanya: *Freire mempunyai publik pembaca yang amat luas. Tetapi pemikiran yang ditemui orang dalam tulisan-tulisannya menuntut sebuah kesadaran untuk diasimilasikan. Pemikirannya memunculkan suatu sintesis yang sulit untuk digenggam totalitasnya. Karenanya para pembacanya mengalami resiko hanya menguasai poin-poin yang secara langsung menyangkut diri mereka,* atau pokok-pokok persoalan yang dapat dimengerti karena referensi yang mereka miliki. Para pembaca di Amerika Latin memahami Freire karena pengalaman politis atau karena suatu keterlibatan dalam sebuah gerakan sosial yang mempunyai kerangka kerja sosial ekonomi. Para pembaca Katolik memihak orientasi humanis Freire dan merasa berada pada dasar yang lazim dengan Freire dan para filsuf yang mempengaruhinya. Para pembaca Marxis menemukan sejumlah aliran kontemporer dalam tulisan-tulisan Freire yang dulu juga dihadapi oleh para pemikir Marxis (*Gramsci, Lukacs, Marcuse*). Para pembaca

akan menemukan aksen pembebasan yang merupakan kecenderungan dalam debat-debat kontemporer. Hanya orang-orang yang sekali atau pernah dalam perjalanan hidup mereka melewati tahap-tahap yang berbeda ini dan menghimpun pengaruh-pengaruh yang berbeda itu, dapat menggenggam totalitas perkembangan intelektual Freire.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶ Denis Collin, *Paulo Freire, Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*.....49-50.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

KONSEP PRAKSIS SOSIAL PEMBEBASAN KAUM TERTINDAS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Sejarah lahirnya Praksis Sosial

Brazil adalah negara berkembang yang terletak di benua Amerika, tepatnya terletak di benua Amerika Latin. Masyarakat Amerika Latin mengalami ketertindasan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Kemiskinan dan kebodohan membayangi hampir seluruh masyarakat Amerika Latin. Tatanan masyarakat yang diterapkan tidak adil, sistem norma, prosedur, kekuasaan, dan hukum memaksa individu-individu untuk percaya bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah fakta yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia.

Kekuasaan digunakan oleh masyarakat yang tidak berkeadilan untuk memaksa dan mengorbankan fisik manusia, sedangkan mitos-mitos sosial dan konsep-konsep distorsif tentang kehidupan manusia menjustifikasi dan merasionalisasi pemaksaan tersebut. Orang-orang yang berkuasa sangat percaya bahwa mereka diharuskan menggunakan kekuasaannya untuk memelihara tatanan dan stabilitas masyarakat. Sistem yang tidak adil pasti bersifat menindas, karena hanya melalui penindasan kelompok yang berkuasa bisa melanggengkan sistem yang tidak adil tersebut.¹

Praksis sosial pembebasan kaum tertindas merupakan gerakan yang gerakannya mirip dengan gerakan Teologi Pembebasan yang muncul pada awal 1960-an. Praksis

¹ William A Smith, *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001) 2.

berupa pemikiran sekaligus cerminan dari keadaan nyata. Gerakan ini mengingatkan adanya dominasi kelas penguasa dan sekutunya yang berlebihan dalam membatasi hak-hak masyarakat miskin yang ada pada waktu itu. Masyarakat miskin telah mengalami penindasan. Fitrah mereka sebagai manusia yang merdeka, mandiri, demokratis, dan bebas menentukan nasibnya sendiri telah ditiadakan.

Brazil saat itu bisa dikategorikan sebagai negara ketiga yang terbelakang. Negara-negara dunia ketiga ini merupakan negara-negara kecil, terbelakang secara ekonomis dan dilanda oleh perpecahan etnis dan agama yang potensial maupun yang telah terjadi keresahan etnis dan agama. Pemberontakan militer, bersama-sama dengan kesulitan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang semakin sulit dipahami, mengakibatkan makin menjauhnya arah kemajuan dunia ketiga ke arah pembebasan politik dan perbaikan ekonomi.

Masyarakat Amerika latin menjadi masyarakat tertutup semenjak dijajah oleh Spanyol dan Portugal. Pada saat yang bersamaan mulai terbentuk budaya bisu, kecuali masyarakat Kuba pasca revolusi. Amerika Latin masih merupakan masyarakat tertutup. Masyarakat saat itu sangat tergantung kepada apa yang dikatakan para penjajahnya, seperti Portugal, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat.

Budaya bisu muncul akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menindas rakyatnya. Rakyat tidak diberi hak untuk menyalurkan pendapatnya, hak-hak sosialnya dibungkam, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak dan lebih baik diabaikan. Kemiskinan dan kebodohan merajalela, pemerintah tergantung pada para penjajah. Maka yang terjadi adalah masyarakat tertutup dengan

munculnya budaya bisu yang mana hanya bisa pecahkan melalui pemberontakan-pemberontakan. Manakala masyarakat tertutup itu mulai melakukan aksi kekerasan dan tuntutan yang semakin kuat, maka budaya bisu tidak lagi dianggap sebagai takdir, namun sebagai akibat kebijakan penguasa yang dapat dan harus dirubah.²

Untuk mengetahui ciri-ciri masyarakat tertutup, bisa dilihat dari struktur sosial yang sangat rigid dan hirarkhis, sedikitnya jumlah pasar, karena perekonomian telah ditentukan oleh negara asing, mengekspor bahan-bahan mentah dan mengimpor barang-barang jadi tanpa memiliki daya tawar, sistem pendidikannya selektif dan “berbahaya” dengan peran sekolah sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Banyaknya orang yang buta huruf dan terserang penyakit, termasuk penyakit yang kedengarannya naif “penyakit tropis” sebagai ciri khas penyakit negara-negara miskin dan mempunyai ketergantungan yang besar, tingginya angka kematian bayi, kekurangan gizi yang berakibat pada gangguan mental yang sulit diobati, rendahnya tingkat harapan hidup, dan tingginya angka kejahatan.³

Pada tahun 1964, kelompok militer menggulingkan pemerintahan Boulart.

Militerlah yang merancang sebuah aksi revolusi menerapkan kebijakan yang telah kita duga sebelumnya yaitu mempertahankan perbudakan dan budaya bisu. Kebijakan ini tidak prospektif. Sama halnya dengan kebijakan diberikannya kebebasan kepada kelompok metropolis yang justru melanggengkan budaya bisu.

² Paulo Freire, *Politik Pendidikan*....137

³ *Ibid*.....134-135.

Masyarakat tertindas yang sadar akan ketertindasannya menuntut netralitas gereja, terutama untuk melakukan rekonsiliasi terhadap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan menurut mereka dengan menjaga stabilitas sosial secara ketat. Dengan demikian, mereka telah mengebiri dimensi kesucian dan kerosulan gereja, menjadi semacam ketakutan akan perubahan. Ketakutan bahwa sebuah dunia yang penuh ketidakadilan akan berubah menjadi tersesat di sebuah masa depan yang tidak menentu. Namun gereja yang mulanya menolak untuk terlibat dalam sejarah, justru akhirnya terlibat. Kenyataan, bahwa aturan gereja berada di luar sejarah justru bertentangan dengan kenyataan, karena gereja secara otomatis menempatkan diri bersama-sama dengan pihak yang menolak keberadaan kaum tertindas.

Karena takut akan ketidakpastian ini, dan berusaha menghindari resiko masa depan yang hanya menerima begitu saja, gereja menjadi kehilangan pegangan. Ia tidak lagi bisa menontrol dirinya sendiri, baik melalui pengharapan sebuah dunia yang lebih adil yang dapat diciptakan melalui praksis sosio-historis dengan melibatkan kaum tertindas. Dalam hal ini gereja tidak lagi menjadi utopis (dalam makna yang positif), jujur atau penuh dengan harapan, sehingga sama seperti kelompok penguasa yang mereka dukung.

Terlepas dari visi yang jujur tadi, gereja justru mengambil tatacara birokrasi formal, di mana harapan (yang tercerabut dari masa depan) menjadi sekedar sebuah abstraksi yang terasing dan semakin menjauh. Alih-alih memberi stimulus kepada para pengikutnya, gereja malah meminta mereka diam di tempat. Pada dasarnya, gerejalah yang mengharamkan paskah yang mereka a_arkan. Gereja telah mati

keinginan tidak mampu merespon aspirasi kaum muda yang menghadap berbagai persoalan, penuh khayalan dan biofilia yang tidak bisa diajak berbicara dengan bahasa lama, dan yang tidak tertarik membicarakan kehidupan para malaikat, karena kaum muda ini lebih dengan drama sejarah mereka sendiri.

Kebanyakan kaum muda ini menyadari betul bahwa masalah yang mendasar di Amerika Latin bukan terletak pada kemalasan masyarakatnya atau inferioritas mereka, atau tingkat pendidikan mereka yang rendah, namun masalahnya adalah karena penjajahan. Dan mereka tahu penjajahan ini bukan sebuah abstraksi atau slogan, tetapi sebuah realitas yang nyata, suatu keadaan yang menjajah dan merusak. Sebelum masalah ini dapat dipecahkan, Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga tidak akan bisa berkembang. Mereka hanya bisa melakukan proses modernisasi, bukan pembebasan. Tanpa pembebasan tidak akan ada pembangunan masyarakat yang sesungguhnya.⁴

Di benua bagian Selatan itu mayoritas rakyat hidup dalam situasi yang tidak adil, suku-suku di tindas dan dihina, kebanyakan dari mereka disisihkan. Hingga dekade-dekade terakhir, massa rakyat di bawah dominasi kelompok kecil yang berkuasa. Pasca kolonialisme klasik negara-negara di sana mengalami industrialisasi, modernisasi, lewat apa yang disebut developmentalisme. Namun proses perubahan yang berciri kapitalis-imperialis itu justru telah menjadi sebab total maupun parsial bagi semakin massifnya penindasan atas mayoritas masyarakat miskin.

⁴*Ibid* 212.

Dan keseluruhan masyarakat Amerika Latin telah menjadi sangat tergantung di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada pusat-pusat kekuasaan di negara-negara kaya (Utara). Dalam keseluruhan konteks ini Teologi Pembebasan untuk kaum tertindas muncul dan berkembang di Amerika latin. Teologi pembebasan sempat menjadi perdebatan besar di kalangan Teolog Katolik (khususnya) terutama pada paruh kedua abad XX (era 1970-an, 1980-an dan awal 1990-an).

Sementara secara khusus, kemunculan teologi pembebasan untuk kaum tertindas juga di pengaruhi perubahan-perubahan internal gereja katolik sendiri.⁵ Hal ini juga beriringan dengan pengaruh eksternal gereja, berwujud perubahan-perubahan sosial dan politik yang berlangsung di Amerika Latin. Perubahan ini dimulai sejak proyek besar Industrialisasi pada 1950-an. Secara langsung maupun tidak langsung, proyek ini telah (justru) membangun “keterbelakangan” yang hanya memperbesar ketergantungan, pertentangan-pertentangan sosial, mendorong laju urbanisasi, memacu perkembangan kota-kota besar, dan menciptakan suatu penusatan kelas pekerja baru.

Dan yang terpenting dari semuanya adalah kian membengkaknya jumlah kaum terlunta-lunta (Proletariat) di wilayah perkotaan. Di samping itu meletusnya revolusi kuba 1959 juga disebut-sebut memberi pengaruh besar pada munculnya berkembangnya teologi pembebasan kaum tertindas, yang dalam beberapa kasus ditandai dengan semakin meningkatnya perjuangan-perjuangan sosial, munculnya

⁵Ulasan lengkap, antara lain, lihat Michael Lowy, *Teologi Pembebasan*, kritik Marxisme, 32-44.

gerakan-gerakan gerilya, pengalihan kekuasaan lewat kudeta militer, berlangsungnya krisis keabsahan sistem politik, dan semacamnya.

Perpaduan perubahan internal dan eksternal itulah yang sedikit banyak telah memungkinkan munculnya upaya fungsionalisasi peran gereja ke arah pembebasan pembelaan terhadap kaum miskin tertindas (baca: gereja orang miskin)⁶. Dalam konteks Amerika Latin praksis pembebasan berarti refleksi kritis atas praksis sejarah pembebasan. Hal ini menunjuk pada sistem-struktur (sosial, ekonomi, politik) yang menindas dan mengebiri kemanusiaan, serta ke dasar manusia yang mendistorsi hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kalau kita telusuri akar ideologis penindasan dari neo-imperialisme, yang bertulang punggungkan kapitalisme dengan jargon paradigma modernitas, akan segera ditemukan pada wacana developmentalisme (*developmentalism*) Gagasan *developmentalism* dimulai sejak Januari 1949, yakni ketika presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengumumkan kebijaksanaan pemerintahannya, di mana term *developmentalism* dan (lawannya) *underdevelopment* secara resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Penyebaran ide developmentalisme di dunia ketiga mula-mula tidak terlepas dari peran penting para pakar ilmu-ilmu sosial Amerika Serikat tahun 1950-an dan 1960-an. Mereka berandil besar dalam pembangunan diskursus akademik wacana ini. Charles Inkeles, David McClland, juga ekonom Rostow yang terkenal dengan

⁶ Upaya ke arah sana tidak terlepas dari petugas awam gereja dan beberapa anggota lembaga kepastoran, para pakar pembantu uskup-uskup yang terlibat konferens-konferensi

Growth Theory-nya adalah tiga di antara pakar yang terlibat. Salah satu hal penting dari studi eksploratif mereka adalah bahwa developmentalisme dan modernisasi harus menjadi pilar utama dalam kebijaksanaan program bantuan (ekonomi) dan politik luar negeri Amerika Serikat.

Proses penyebaran dilakukan melalui penciptaan *network* institusional, seperti lembaga dana internasional (World Bank dan IMF), Universitas, lembaga-lembaga riset, badan-badan perencanaan pembangunan nasional dan sebagainya. Dengan ini penyebarannya di percepat melalui para intelektual, teknokrat, pemimpin dan tokoh agama, bahkan para aktifis LSM/NGO (lembaga swadaya masyarakat, non governmental organization) dari dunia ketiga, di mana mereka semua merupakan pasar utama obyek ini, yang dialirkan oleh lembaga-lembaga Pendidikan Barat lewat program '*development studies*' yang mereka dirikan.

Wacana developmentalisme, secara sederhana bisa dikatakan membawa misi sistem ekonomi-politik liberal kapitalis. Sebab sistem ekonomi-politik yang ditawarkan mengetengahkan dalil (janji) bahwa proses pemerataan akan seketika terjadi pada semua pihak yang terlibat di dalamnya (entah dengan modal atau tenaga) kalau mekanisme pertukaran pasar dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Intervensi pemerintah dibenarkan sejauh hanya menyediakan pasar untuk berfungsi, dan hanya sepanjang muncul dampak negatif yang perlu dikoreksi, misalnya pengadaan lembaga-lembaga pendidikan, pembangunan rumah sakit, jalan-jalan untuk

keuskupan, kelompok-kelompok kerukunan tetangga, serikat-serikat buruh perkotaan maupun pedesaan, serta yang tak kalah penting kelompok-kelompok masyarakat basis.



transportasi demi memperlancarkan sistem pasar dan modal, serta jaminan sosial untuk kaum buruh yang menganggur.

Pertumbuhan GNP (*Gross National Product*, Hasil Kotor Nasional) pada saat dimulainya proyek developmentalisme berpusat pada masyarakat gemuk modal. Asumsinya, dengan meningkatnya GNP dan mutu tenaga kerja, kemakmuran akan menetas ke bawah, ke semua lapisan masyarakat (*trickle down effect*). Maka dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, gagasan developmentalisme menjadi program “wajib” dan berhasil menjadi “agama” baru bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga nyaris tanpa *reserve*.

Diyakini ia merupakan satu-satunya solusi untuk memecahkan soal-soal kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal ide ini bukanlah pengetahuan atau gagasan yang netral. Selain sarat dengan Ideologi Barat, wacana ini juga mengandung nafsu untuk mengontrol negara-negara miskin dengan penggunaan kekuasaan dan dominasi politik-ekonomi. Melalui diskursus ini, penetapan kontrol negara maju terhadap negara-negara berkembang dilakukan dengan labelisasi “kekurangan” terhadap pihak yang disebut terakhir.

Label “kekurangan” tentang hal-hal yang (hanya) dapat dipenuhi oleh teknologi dan keahlian profesional. Hubungan inilah yang kemudian disebut sebagai hubungan Imperialisme. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wacana developmentalisme. *Pertama*; bahwa ia akan melanggengkan struktur dan sistem ekonomi eksploitatif atau struktur kelas sosial yang tidak adil. *Kedua*; mengandung dominasi kultural dan

ideologi. Dalam hal ini *state* berupaya mendominasi *society* (masyarakat) melalui proses dominasi ideologi dan budaya yang lazim disebut hegemoni.

Dalam pengertian umum hegemoni adalah suatu loyalitas spontan dari massa mayoritas terhadap kelompok sosial dominan karena keunggulan status sosial, ekonomi dan intelektual. Dalam pandangan Gramsci dirumuskan bahwa istilah hegemoni sebagai aliansi kelas yang mendominasi kelas lain. Invasi hegemoni ini dilakukan baik secara memaksa (*coercion*) seperti perang, maupun 'concent' (persetujuan), semisal lewat pemberian proyek-proyek bantuan, pertukaran ahli, transfer teknologi, dan sebagainya.

Sehingga developmentalisme karenanya mampu meneguhkan diri sebagai ideologi baru, mempengaruhi sistem atau nilai politik dan budaya. Di saat yang sama dengan propagandanya menggusur ideologi, budaya dan teknologi masyarakat bawah. Dalam hal ini peran lembaga-lembaga dana internasional, seperti Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*) teramat penting dalam keseluruhan proses ini.

Ketiga; adanya dominasi pengetahuan dalam developmentalisme⁷. Ia yang berakar pada positivisme menyingkirkan kemungkinan segala bentuk pengetahuan non-positivisme. Padahal pengetahuan dalam konteks developmentalisme sarat ideologi dan nafsu kontrol terhadap sumber pengetahuan dan diskursus pengetahuan tersebut. Akibatnya pengetahuan tidak lagi netral, tetapi mengandung kekuasaan yang karenanya perpihak pada kepentingan pengembangan developmentalisme.

Keempat; Watak anti *nature* dalam gagasan ini. Perwujudan watak ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang hebat melalui proyek-proyek eksplorasi dan eksploitasi alam. Hancurnya hutan-hutan tropis di negara-negara ketiga menjadi bukti konkrit dari watak anti alam ini. Terakhir, *Kelima*; dalam beberapa hal ternyata developmentalisme menjadi problem wacana gender, di mana justru melanggengkan struktur penindasan dan diskriminasi atas kaum perempuan di dunia ketiga.

Di sisi lain, dalam konteks global, proses developmentalisasi negara-negara berkembang telah melahirkan beragam krisis humanitas yang cenderung terus meluas. Dalam banyak hal, terutama di masyarakat negara berkembang. Sejak dimunculkannya tahun 1950-an dan diekspor ke dunia ketiga, sistem liberal-kapitalis ini justru telah menimbulkan jurang renggang yang semakin lebar dan dalam antara kelompok sosial yang miskin dengan kelompok *the have* (berpunya); seka igus pada lingkup luas, antara negara miskin di Selatan dan negara-negara kaya di Utara.

Ketergantungan dan proses marginalisasi semakin tajam terhadap proses pertama. Negara-negara miskin semakin tergantung pada negara-negara kaya baik secara politik maupun ekonomi (termasuk budaya), misalnya dalam hal lemahnya *bergaining position* (posisi tawar menawar) pihak pertama dalam hubungan dagang internasional, dan ketergantungan dalam perangkap utang luar negeri (*debt trap*).

Di negara-negara berkembang, desa-desa semakin terpinggirkan dan sangat tergantung pada kota. Para buruh yang marginal semakin menggantungkar nasibnya pada majikan yang terus menerus melakukan pemerasan, intimidasi dan eksploitasi.

⁷ Rizal Sukma, "Hubungan Internasional dekade 1990-an : Hegemoni, Dekonstruksi, dan

Dan seterusnya situasi semacam ini kerap disebut oleh para teolog pembebasan Amerika Latin sebagai *Institutionalized Violence*, kekerasan atau penindasan atas si miskin yang telah melembaga.

B. Konsep Paulo Freire tentang Pembebasan Kaum Tertindas

Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil, dan kelompok yang menikmati itu justru bagian minoritas umat manusia. Dilihat dari segi jumlah saja menunjukkan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak berimbang, tidak adil. Persoalan ini kemudian yang disebut sebagai "*Situasi Penindasan*".

Penindasan, apapun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi). Dehumanisasi bersifat ganda dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas, keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak asasi mereka dinistakan dan mereka dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam "*kebudayaan bisu*".⁸

Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan

Agenda", Ilmu Politik, 15 (1995) 3-6.

⁸ Kebudayaan bisu, menurut Freire adalah kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidak berdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri, sehingga "diam" nyaris dianggap sesuatu yang sakral, sikap yang sopan dan harus ditaati.

penindasan bagi sesamanya. Maka tidak ada pilihan lain, ikhtiar memanusiaikan kembali manusia (humanisasi) ajaran dari *humanisme*,⁹ merupakan pikiran mutlak. Humanisasi merupakan satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan, walaupun dehumanisasi adalah kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu kemungkinan ontologis di masa mendatang.

Itu bukanlah suatu keharusan sejarah. Secara dialektis, suatu kenyataan tidak mesti menjadi suatu keharusan, jika kenyataan menyimpang dari keharusan, maka menjadi tugas manusia untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah fitrah manusia sejati.

Meski pemanusiaan dan dehumanisasi merupakan alternatif, hanya pemanusiaan yang menjadi fitrah manusia. Fitrah ini selalu diinjak-injak, namun justru tiap kali diinjak, ia makin diteguhkan, ia dikerdilkan lewat ketidakadilan, dieksploitasi, penindasan dan kelaparan yang dilakukan oleh penindas. Ia diteguhkan kembali melalui dambaan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta dikuatkan kembali lewat perjuangan kaum tertindas itu untuk memulihkan kembali kemanusiaan yang telah hilang.¹⁰

⁹ Gerakan kaum humanis yang bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat. Melalui *Pendidikan Liberal*, mereka mengajarkan bahwa manusia pada prinsipnya adalah makhluk bebas dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya. Maka, dalam batas-batas tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu dari luar yang membelenggu kebebasan manusia harus segera di patahkan. Lihat Zainul Arifin, *Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya; 2000) 26.

¹⁰ Paulo Freire, "**Pendidikan yang Memanusiaikan dan Pendidikan yang Membebaskan**": *Menggugat Pendidikan, Fundamental, Konservatif, Liberal, dan Anarkis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) 434.

Dehumanisasi, keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi manusia, bukan hanya menandai mereka yang kemanusiaannya telah dirampas, melainkan (dalam cara yang berlainan) menandai pihak yang telah merampas kemanusiaan itu, dan merupakan pembengkokan cita-cita untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Distorsi ini terjadi dalam sejarah; namun ia bukanlah fitrah sejarah. Bila kita menganggap dehumanisasi sebagai fitrah sejarah, kita akan terbawa ke sinisme atau keputusasaan menyeluruh.

Perjuangan untuk meraih kemanusiaan, perjuangan demi emansipasi tenaga kerja, demi menaklukkan keterasingan, demi meneguhkan manusia sebagai pribadi akan kehilangan makna bila dehumanisasi diakui sebagai fitrah sejarah. Perjuangan menjadi mungkin karena dehumanisasi mesti merupakan produk sejarah, bukan takdir manusia melainkan produk tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan para penindas, yang pada gilirannya mengubah kaum tertindas menjadi kurang dari manusia.

Karena dehumanisasi adalah pembengkokan cita-cita untuk menjadi manusia lebih utuh, cepat atau lambat kaum tertindas akan bangkit berjuang melawan mereka yang telah mendehumanisasikan kaumnya.¹¹ Agar perjuangan ini lebih bermakna, kaum tertindas jangan sampai dalam mengusahakan, memperoleh kembali kemanusiaan mereka, berubah menjadi *penindas kaum penindas*, melainkan mereka harus memanusiakan kembali keduanya.

¹¹ *Ibid...*435.

Hampir setiap kali dalam tahap perjuangan itu, kaum tertindas cenderung menjadi penindas-penindas baru atau menjadi ‘cabang penindas’, bukannya berjuang demi pembebasan. Struktur pemikiran mereka telah dikondisikan oleh pertentangan-pertentangan yang nyata, dibentuk oleh situasi yang eksistensial. Mereka bercita-cita untuk menjadi manusia, tetapi bagi mereka manusia adalah para penindas. Inilah model kemanusiaan mereka. Fenomena ini terjadi pada kaum tertindas, di saat tertentu dalam, pengalaman eksistensial mereka menyerap watak para penindas.

Dalam keadaan seperti itu mereka tidak dapat mempertimbangkan keberadaan para penindas secara cukup jernih, mereka tidak mengobjektifikasi para penindas itu tak mampu menemukan para penindas di luar mereka. Bukan berarti kaum tertindas tak sadar bahwa dirinya terinjak-injak. Namun konsepsi mereka tentang diri mereka sendiri sebagai manusia-manusia tertindas dikaburkan oleh keadaan terbenam dalam realitas penindasan.

Ditingkat ini, persepsi diri bahwa mereka adalah ‘*kaum tertindas*’ belum menggugah mereka untuk berjuang menaklukkan kontradiksi itu. Jadi bukannya ingin membebaskan diri melainkan untuk mengidentifikasikan diri dengan bentuk yang satunya lagi. Karena kaum tertindas belum bercita-cita merealisasikan pembebasan melainkan hanya berjuang supaya menggantikan tempat para penindas.

Rasa ‘takut kebebasan’ yang menimpa kaum tertindas, ketakutan yang baik mendorong mereka untuk menginginkan peranan sebagai penindas maupun mengurung mereka tetap sebagai orang tertindas. Kaum tertindas yang menginternalisasi citra diri kaum penindas dan menyesuaikan diri dengan jalan

pikiran mereka, mengalami rasa takut menjadi bebas (otonomi) serta tanggung jawab.¹² Kebebasan diperoleh dengan direbut, bukan dihadiahkan. Ia harus diperjuangkan dengan segenap keteguhan hati dan perasaan tanggung jawab.

Untuk mengatasi situasi penindasan, manusia pertama kali harus mengenali secara kritis sumber penyebabnya, kemudian melakukan tindakan perubahan di mana mereka dapat menciptakan situasi yang baru, situasi yang memungkinkan terciptanya manusia yang lebih utuh. Tetapi perjuangan untuk menjadi manusia seutuhnya telah dimulai dalam perjuangan otentik untuk mengubah situasi. Meskipun situasi penindasan adalah situasi yang tidak insaniah dan menafikan kemanusiaan serta mempengaruhi kaum penindas maupun kaum yang mereka tindas, tetapi yang disebut terakhir inilah yang harus, karena kemanusiaan mereka telah diperkosa, melakukan perjuangan ke arah pencapaian kemanusiaan, baik bagi penindas mereka maupun diri mereka sendiri. Sementara kaum penindas yang tidak insaniah karena menjadikan orang lain tidak insaniah, tidak akan memimpin perjuangan ini.

Penyadaran bagi kaum tertindas, sebagai penyadaran bagi para humanis dan pembebas, terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama kaum tertindaslah yang membuka tabir dunia penindasan dan melalui praksis melibatkan diri untuk melakukan perubahan. Pada tahap kedua, di mana realitas penindas itu sudah berubah, penyadaran ini tidak lagi menjadi milik kaum tertindas melainkan menjadi penyadaran untuk seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langgeng.

¹²*Pendidikan Kaum Tertindas...* 16

Dalam kedua tahap ini dibutuhkan gerakan yang mendasar agar kultur dominasi dapat dilawan secara kultural pula. Pada tahap pertama, maka perlawanan itu terjadi dalam hal kaum tertindas menyadari akan adanya dunia penindasan. Dan pada tahap kedua, dengan memberantas habis mitos-mitos yang diciptakan dan dikembangkan di masa orde lama, yang bagaikan hantu-hantu yang menghantui bangunan baru yang muncul dari perubahan revolusioner.¹³

Pada tahapan yang pertama penyadaran harus membahas masalah penyadaran kaum tertindas dan kaum penindas, yakni masalah manusia yang menindas dan manusia yang menderita penindasan itu. Bahasan itu harus menyangkut perilaku, pandangan dunia etika mereka. Suatu masalah khas dalam hal ini adalah dualitas kaum tertindas. Mereka adalah manusia kontradiktif dan terbelah, dibentuk dan hidup dalam situasi penindasan dan kekejaman yang nyata.

Tuntutan agar kaum tertindas terlibat dalam pemikiran tentang suatu ajakan bagi revolusi sambil duduk. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran sejati mengarah pada tindakan. Di lain pihak, jika situasi menghendaki tindakan, maka tindakan itu akan menjadi suatu praksis murni hanya konsekwensinya dijadikan obyek pemikiran kritis. Ditinjau dari sudut ini, maka praksis merupakan *raison d'etre* baru bagi kaum tertindas; dan revolusi yang meresmikan aspek kesejarahan dari *raison d'etre* ini, tidak dapat dipisahkan dari pelibatan kesadaran kaum tertindas pada saat ia terjadi. Tanpa hal itu, tindakan saja merupakan aktivisme murni.

¹³ *Ibid* ... 27

Untuk mencapai praksis ini, disyaratkan untuk memberi kepercayaan kepada kaum tertindas serta kemampuannya untuk bernalar. Barang siapa yang telah mempunyai kepercayaan ini, akan gagal untuk melaksanakan (atau akan menggagalkan) dialog refleksi dan komunikasi, dan akan terjerumus pada penggunaan slogan-slogan, pernyataan-pernyataan, monolog, perintah-perintah, pembelotan setengah hati ke dalam usaha pembebasan mengandung bahaya ini.

Tindakan politik yang berpihak pada kaum tertindas harus merupakan tindakan yang mendidik dalam artian kata yang sesungguhnya, dan karena itu merupakan tindakan yang dilakukan bersama kaum tertindas. Mereka yang berjuang untuk pembebasan tidak boleh memanfaatkan ketergantungan emosional kaum tertindas. Ketergantungan akibat dari situasi pengekangan konkrit yang mengungkung mereka dan menimbulkan pandangan dunia mereka yang tidak murni. Menggunakan ketergantungan mereka untuk menciptakan ketergantungan yang lebih besar, adalah taktik kaum penindas.

Cara yang tepat bagi suatu kepemimpinan revolusioner dalam melakukan tugas pembebasan, karenanya bukanlah 'propaganda pembebasan. Kepemimpinan juga tidak dapat melulu 'menanamkan' pada kaum tertindas suatu keyakinan pada kebebasan, lalu menganggap berhasil dan membuat mereka percaya diri. Cara yang benar terletak dalam dialog. Keyakinan kaum tertindas bahwa mereka harus berjuang untuk pembebasan karena pembebasan bukanlah suatu hadiah yang dianugerahkan oleh kepemimpinan revolusioner, tetapi hasil dari penyadaran mereka sendiri.

Perjuangan telah dimulai pada saat kaum tertindas menyadari bahwa diri mereka telah dihancurkan. Propaganda, manajemen, manipulasi, semuanya senjata dominasi tak bisa menjadi alat rehumanisasi atau pemanusiaan kembali kaum tertindas. Satu-satunya alat efektif dalam sebuah penyadaran pemanusiaan adalah hubungan timbal balik permanen berbentuk dialog antara para pemimpin revolusioner dengan kaum tertindas. Dalam penyadaran yang memanusiakan maka metode ini tidak lagi menjadi alat bagi pemimpin revolusioner untuk dapat memanipulasi kaum tertindas, karena penyadaran yang memanusiakan mengungkapkan kesadaran para kaum tertindas.

Praksis revolusi harus berhadapan dengan praksis elit penguasa. Praksis revolusi juga tidak dapat mentolerir dikotomi *absurd* di mana praksis rakyat hanya sekedar pelaksanaan keputusan-keputusan para pemimpin, suatu dikotomi yang mencerminkan metode resep dari elit penguasa. Praksis revolusi merupakan suatu kesatuan, dan para pemimpin tidak dapat memperlakukan kaum tertindas sebagai milik mereka. Manipulasi, pembuatan slogan, usaha “menabung”, menggolong-golongkan, dan pemberian resep tidak boleh menjadi unsur-unsur dari praksis revolusi.

Keikutsertaan kaum tertindas adalah mutlak esensial dalam proses seiring dengan semakin kritisnya kesadaran terhadap peranan mereka sebagai pelaku dari perubahan. Bila mereka terseret ke dalam proses sebagai manusia yang mendua separuh dirinya sendiri dan separuh lagi para penindas yang di serap ke dalam dirinya dan bila kemudian mereka berkuasa dengan menunjukkan sifat mendua yang di

paksakan kepada mereka oleh situasi penindasan itu, maka mereka telah meraih kekuasaan.¹⁴

Revolusi tidak dilaksanakan baik oleh para pemimpin untuk rakyat, tidak juga oleh rakyat untuk pemimpin, melainkan oleh keduanya yang bertindak bersama-sama dalam solidaritas yang tidak tergoyahkan. Solidaritas ini lahir hanya bila para pemimpin menyaksikan melalui perjumpaan mereka yang rendah hati, penuh kasih serta berani, dengan rakyat. Tidak semua orang memiliki keberanian yang cukup bagi perjumpaan ini. Namun bila manusia mengelak perjumpaan, mereka akan menjadi kaku dan memperlakukan orang lain hanya sebagai obyek, bukannya memelihara kehidupan, mereka malah membunuh kehidupan, bukannya mencari kehidupan, mereka malah melarikan diri dari padanya. Dan semua ini adalah ciri-ciri kaum penindas.

Revolusi sejati berusaha mengubah realitas yang melahirkan masalah-masalah yang menafikan manusia. Mereka yang kepentingannya diuntungkan oleh realitas tersebut tidak dapat melaksanakan perubahan ini. Ia harus diwujudkan oleh para korban para tirani, bersama para pemimpin mereka. Kebenaran ini harus melahirkan konsekwensi mendasar yakni para pemimpin harus mewujudkan perubahan itu melalui persekutuan dengan rakyat. Dalam persekutuan ini kedua kelompok tumbuh bersama, dan para pemimpin, bukannya mengangkat diri sendiri, kemudian di tunjuk atau disyahkan dalam praksis mereka dengan praksis rakyat.¹⁵

¹⁴ *Pendidikan kaum Tertindas....*126-127.

¹⁵ *Ibid* 131

Revolusi lahir sebagai gejala sosial dalam masyarakat penindas. Sejauh ia merupakan aksi kebudayaan, maka ia tidak mungkin tidak berkaitan dengan potensi-potensi dari wujud sosial di mana ia muncul. Setiap gejala berkembang (atau berubah) dalam dirinya sendiri, melalui saling pengaruh dalam kontradiksi-kontradiksinya. Pengaruh dari luar, yang memang dibutuhkan, hanya efektif bila sesuai dengan potensi-potensi tersebut. Sifat baru revolusi dimunculkan dari yang lama, masyarakat yang menindas, perebutan kekuasaan hanya merupakan peristiwa menentukan untuk melanjutkan proses revolusi.

Bagi pandangan revolusi yang dinamis, bukan statis, tidak ada “sebelum” atau “sesudah” yang mutlak dengan perebutan kekuasaan sebagai garis pemisah. Revolusi berusaha untuk menggeser situasi penindasan dengan membangun suatu masyarakat manusia dalam proses pembebasan yang terus menerus, sifat mendidik dan dialogis dari revolusi, yang juga menjacikannya suatu “revolusi kebudayaan” harus terdapat dalam setiap tahap-tahapnya.

Sifat mendidik ini adalah salah satu alat yang paling efektif untuk menghindarkan revolusi dari bahaya menjadi terlembaga dan berjenjang dalam suatu birokrasi yang kontra revolusioner dilaksanakan oleh kaum revolusioner yang menjadi reaksioner. Dan untuk itulah diperlukan dialog dengan rakyat. Dialog dengan rakyat bukanlah merupakan suatu konsesi atau hadiah, apalagi suatu taktik yang dimanfaatkan untuk mendominasi. Dialog, sebagai perjumpaan antar manusia untuk ‘menamai’ dunia, merupakan prasyarat dasar bagi humanisasi sejati mereka. Sebagaimana yang dikatakan Gajo Petrovic:

Suatu tindakan bebas hanya dapat terlaksana di mana seseorang mengubah dunianya dan dirinya.... suatu kondisi positif dari kebebasan adalah pengetahuan mengenai batas-batas kewajiban, kesadaran mengenai kemampuan-kemampuan kreatif manusia... perjuangan mencapai masyarakat bebas bukanlah perjuangan mencapai masyarakat bebas, kecuali seiring dengan itu diciptakan suatu peningkatan kadar kebebasan pribadi.¹⁶

Bila pandangan ini benar, maka proses revolusi adalah terutama bersifat pendidikan. Dengan demikian jalan menuju revolusi meliputi keterbukaan terhadap rakyat, bukan ketidakpedulian terhadap mereka. Ia meliputi persekutuan dengan rakyat, bukan kecurigan. Dan seperti yang dikatakan Lenin, semakin suatu revolusi membutuhkan teori, semakin para pemimpinnya harus bersama rakyat agar dapat berhadapan melawan kekuasaan penindas.

Salah satu ciri-ciri aksi kebudayaan menindas yang hampir tidak terlihat oleh para ahli yang berdedikasi tetapi naif yang menggeluti masalah ini adalah penekanan pada pemahaman terhadap berbagai masalah secara terkotak dan bukan memahaminya sebagai dimensi-dimensi dari suatu totalitas. Dalam proyek-proyek “pengembangan masyarakat” semakin suatu daerah atau wilayah di pecah menjadi ‘masyarakat-masyarakat lokal’, tanpa pengkajian terhadap masyarakat-masyarakat ini baik masing-masing sebagai totalitas tersendiri maupun sebagai bagian-bagian dari totalitas lain (daerah, wilayah dan sebagainya) —yang pada gilirannya merupakan

¹⁶ *Ibid* 139-141

bagian dari totalitas yang lebih besar bagi (bangsa, sebagai bagian dari totalitas kontinental)— maka semakin jauh keterasingan yang tercipta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dan semakin jauh rakyat terasing, semakin mudah untuk memecah mereka serta memelihara perpecahan itu. Bentuk-bentuk aksi yang terkotak ini, dengan menekankan cara hidup yang terkotak-kotak dari kaum tertindas (terutama di daerah pedalaman), menghalangi kaum tertindas untuk memahami realitas secara kritis dan membuat mereka tetap terjauh dari masalah-masalah penindasan manusia di daerah lain.¹⁷

Bila aksi kebudayaan, sebagai suatu proses keseluruhan dan menyeluruhkan, mendekati masyarakat secara keseluruhan dan tidak sekedar para pemimpinnya. Maka kaum penindas tidak mau memajukan masyarakat secara keseluruhan, hanya para pemuka yang terpilih. Maka yang terjadi adalah pertentangan kelas yang merepotkan kaum penindas, karena mereka tidak lagi menganggap diri mereka sebagai kelas penindas. Karena tidak dapat mengingkari, sekalipun dengan berbagai digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id upaya, keberadaan kelas-kelas sosial, mereka berkhobah tentang perlunya saling pengertian dan keserasian antara mereka yang membeli dan yang berkewajiban menjual karya mereka.

¹⁷ Kritik ini sudah tentu tidak untuk tindakan-tindakandalm suatu perspektif dialektis, atas dasar pengertian masyarakat lokal sebagai suatu totalitas pada dirinya sendiri dan sebagai bagian dari suatu totalitas yang lebih besar. Kritik ini ditujukan pada mereka yang tidak menyadari bahwa pengembangan masyarakat lokal tidak dapat berlangsung kecuali dalam konteks total di mana ia menjadi satu bagian, dalam interaksi dengan bagian-bagian yang lain. Persyaratan ini mencakup kesadaran akan kesatuan dalam keanekaan, akan organisasi yang menyalurkan kekuatan-kekuatan yang berserakan, serta keinsafan yang terang akan keharusan untuk mengubah realitas. Hal ini (dapat dipahami) merupakan sesuatu yang mencemaskan kaum penindas.

upaya, keberadaan kelas-kelas sosial, mereka berkhotbah tentang perlunya saling pengertian dan keserasian antara mereka yang membeli dan yang berkewajiban menjual karya mereka.

Setiap gerakan kaum tertindas ke arah persatuan menunjuk kepada tindakan-tindakan yang lain, ini berarti cepat atau lambat kaum tertindas akan menyadari dirinya yang tidak berkepribadian dan melihat bahwa selama mereka terpecah-pecah mereka senantiasa akan menjadi sasaran empuk bagi manipulasi dan dominasi. Dominansi itu dicapai dengan strategi memecah belah kaum tertindas, agar dapat melangsungkan *status quo*. Tetapi kaum penguasa berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai penyelamat dari orang-orang yang telah mereka hilangkan kemanusiaannya dan memecah belahnya.

Pada proses lebih jauh, tidak mungkin dapat menyembunyikan maksud yang sesungguhnya yaitu menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka ingin menyelamatkan harta, kekuasaan, serta gaya hidup mereka, meliputi hal-hal yang memungkinkan mereka menundukkan orang lain. Karena berusaha untuk melestarikan *status quo* maka penting bagi para penindas untuk menghalangi kaum tertindas dari pengetahuan mengenai strategi mereka.

Karena itu penindas harus meyakinkan tertindas bahwa mereka sedang 'dipertahankan' dari pengaruh jahat 'kaum abangan kaum pengacau serta musuh-musuh Tuhan'. Itu semua merupakan julukan-julukan yang dialamatkan kepada mereka yang hidup dan menghidupi usaha berani bagi humanisasi manusia. Agar

antara kelas penguasa dengan kelas yang dikuasai —pakta-pakta yang, jika dilihat secara sepintas, memberi kesan adanya dialog antar kelas. Akan tetapi sesungguhnya, pakta-pakta itu bukanlah dialog, sebab tujuan sebenarnya secara jelas telah ditentukan bagi kepentingan elit penguasa.

C. Kondisi Sosial Politik di Indonesia

Secara umum keadaan Indonesia saat ini merupakan masa transisi dari krisis multidimensi menuju keadaan yang baru. Masa transisi ini ditandai dengan anomi, yaitu keadaan masyarakat yang kehilangan pegangan yang diakui umum, norma-norma menjadi kabur dan ditambah dengan menipisnya kesabaran telah menimbulkan konflik horizontal yang luas.

Di tengah krisis yang menuntut setiap orang untuk bertahan hidup dari hari ke hari, maka agenda merumuskan masa depan lebih baik merupakan tincakan yang optimis. Apalagi masa depan itu adalah masa depan Indonesia. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia bersumber pada SARA (Suku, agama, ras dan aliran) seperti yang terjadi di Maluku, Kalimantan Barat, dan tempat-tempat yang lain. Di tambah lagi konflik elit politik di Indonesia yang tidak dewasa akhir-akhir ini menambah daftar panjang konflik yang ada di Indonesia.

Konflik rasialisme harus segera di akhiri karena rasialisme adalah sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karenanya, ia tidak boleh dibiarkan hidup di bumi ini. Dalam kasus rasialisme, diskriminasi yang sifatnya vertikal akan lebih mudah penyelesaiannya dibandingkan

yang horizontal. Karena, persoalannya terletak pada bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan negara. Tampaknya semua sepakat persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi dengan pembangunan sistem negara, politik, hukum, ekonomi, yang demokratis dan yang menghargai HAM (Hak Asasi Manusia).

Sementara rasialisme horizontal membutuhkan waktu yang panjang untuk meniadakannya. Karena hal ini berurusan dengan prasangka sosial sebuah masyarakat, sebuah bangsa, yang berakar jauh di masa kolonialisme Belanda. Artinya, jika menginginkan masyarakat yang tidak rasis, maka kita harus merubah pola pikir sebuah bangsa. Negara dan pemerintahan yang demokratis sekalipun belum tentu menjamin keberhasilan upaya bangsa melepaskan diri dari prasangka rasial tersebut.¹⁸

Munculnya konflik yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan oleh kecenderungan para elit politik kita saat ini yang melempar isu dengan cara menyudutkan lawan-lawan politiknya. Dalam melemparkan isu yang saling menyudutkan ini, mereka menggunakan beragam alasan yang seolah-olah logis, tetapi dibalik itu sebenarnya mereka sedang memainkan suatu politik kambing hitam dengan memutar balikkan fakta. Fenomena-fenomena tersebut terjadi karena mentalitas Orde Baru masih membayangi kita dari beberapa unsur;

Pertama, budaya feodal yang dilestarikan dan diterapkan model pemerintahan fasisme. Dalam budaya feodal, rakyat dibuat sedemikian patuh terhadap para penguasa yang menjelma secara nyata dalam dari para priyayi. Di zaman sekarang

pola-pola tersebut masih di pertahankan dan dikembangkan demi kepentingan-kepentingan dan tujuan pemerintah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Rakyat dibuat manut dan bodoh ketika sumber daya alam dan sumber daya manusia dieksploitasi demi kepentingan penguasa. Jika rakyat menolak maka yang muncul adalah stigma sebagai gerakan subversive. Kepatuhan dan ketaatan rakyat di pelihara dengan ancaman kekerasan angkatan perang dan polisi rahasia. *Kedua*, Sistem pemerintahan yang fasis, hal ini meniru pada zaman pendudukan Jepang dengan metode ancaman, penyiksaan, teror dan ketakutan massal.¹⁹

Indonesia sekarang ini di landa arus reformasi pasca tumbangnya rezim Soeharto dan beralih pada masa transisi. Rakyat Indonesia diliputi kemenangan karena setelah tiga puluh dua tahun Orde Soeharto berkuasa sekarang telah tumbang. Kemenangan, kegembiraan, yang diluapkan masyarakat Indonesia itu ternyata sesuatu yang semu, karena menganggap Soeharto telah lengser dan segala sesuatunya telah final. Buktinya adalah maraknya pesta pora atas kemenangan itu dalam apa yang sering digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disebut sebagai “*euforia politik*”.

Euforia bisa menipu, karena kemenangan yang dicapai belum menyentuh agenda yang paling mendasar dan menyangkut kebutuhan orang banyak, serta berdimensi waktu panjang ke depan.²⁰ Sekarang setelah Soeharto tumbang, kemiskinan

¹⁸ Solidaritas Nusa Bangsa, *Seri Pendidikan Anti Diskriminasi*, (Jakarta: nomor 19, Minggu ketiga Maret 2001) 9.

¹⁹ Benny Susetyo, Pr, *Orde Para Bandit*, (Yogyakarta: LKiS & Averroes Press, 2001) 2-3.

²⁰ Ulil Abshor Abdallah, *Membakar Rumah Tuhan*, (Bandung: PT. remaja RosdaKarya, 1999) 227.

merajalela kemana-mana, padahal menumbangkan Soeharto adalah satu urusan dalam mengatasi kemiskinan serta urusan sosial lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Tumbangnya Soeharto meninggalkan banyak kebodohan dan kejahatan, harga kebutuhan pokok mulai naik, masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kemiskinan dan kelaparan semakin tidak terelakkan. Seiring dengan kejatuhan soeharto, maka kesadaran politik rakyat juga meningkat pesat, hal ini di dukung informasi dari media cetak maupun elektronik. Surat kabar, majalah, suara berita di televisi menjadi komoditi yang laris, begitu pula buku-buku politik yang di masa Orde Baru berkuasa nyaris mustahil untuk diterbitkan apalagi sampai dicetak ulang berkali-kali, kini dapat beredar luas tanpa takut dituduh subversive.

Dalam gerakan reformasi terlihat ada indikasi yang tidak sehat. Pertikaian antara kawan dan lawan atau sebaliknya kian memanas. Tidak ada yang berfikir bagaimana segera keluar dari persoalan bangsa yang terus berkecamuk. Tetapi yang ada hanya pertikaian antar kelompok dan kepentingan pribadi. Padahal rakyat sudah kian lapar dan tak sabar menunggu kembalinya harga-harga ke keadaan normal. Kelaparan, bagaimana pun tak bisa terus menerus ditangani dengan tindakan kuratif dalam bentuk *social safety net*.

Untuk kebutuhan darurat demi mengganjal perut sehari dua hari, mungkin itu perlu. Tetapi untuk angka panjang kebijakan seperti ini sangat sulit dipertahankan sehingga perlu dicarikan solusi yang efektif. Situasi Indonesia di masa transisi juga ditandai dengan terjadinya kerusuhan yang melanda Indonesia dimana dari hari ke

hari semakin parah. Sementara itu, Gerry mengkritik elit-elit Jakarta yang dalam melihat sejumlah kerusuhan akhir-akhir ini terjebak dalam dua kecenderungan.

Pertama, melihat kerusuhan itu sebagai peristiwa yang agaknya hampir mustahil muncul sebagai akibat yang 'wajar' dari keadaan yang sudah lama terjadi di daerah yang bersangkutan. Kerusuhan itu selalu diandaikan sebagai akibat dari perbuatan para provokator atau aktor intelektual. Persepsi ini, bukan saja dikemukakan oleh orang-orang di pusat tetapi juga dipercaya oleh orang-orang daerah sendiri.

Kedua, ada kecenderungan orang-orang di pusat untuk melihat kerusuhan-kerusuhan itu dari sudut pandang yang agak "sentralistik" yaitu bahwa ia akan menyebabkan disintegrasi nasional dan menghancurkan sendi-sendi negara kesatuan yang telah dibina bertahun-tahun.²¹

Kerusuhan atau bencana politik yang dihadapi bangsa Indonesia dikelompokkan dan dua hal. *Pertama*, bencana dalam bidang ekonomi moneter, dimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak berpihak pada rakyat miskin tetapi pada para konglomerat dan cukong-cukongnya. Sehingga seringkali terjadi kesenjangan sosial. Kebijakan ekonomi yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia adalah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi kerakyatan.

Moechtar Mas'ood menyebutnya sebagai pendekatan nasionalisme ekonomi. Yaitu pendekatan yang memanifestasikan dalam kebijakan: (1) Melindungi wiraswasta pribumi dari kemusnahan dan membantu mereka menjadi pelaku pembangunan ekonomi yang kuat dan otonom. (2) Mobilisasi dan investasi asing

²¹*Ibid* 232

serta penyediaan “jaring-jaring penyelamat” untuk menghindari kemiskinan dan dominasi pelaku ekonomi asing serta diiringi pula pembukaan sektor-sektor yang bisa dimasuki investor asing agar sektor-sektor yang dikelola ekonomi pribumi tidak ikut terdesak.²²

Kedua, dalam bidang HAM (hak asasi manusia) hal ini dapat dilihat sering terjadinya pelanggaran HAM seperti: tragedi Sampit, Poso, Situbondo, Aceh, Maluku dan lain sebagainya. Untuk itu ada tiga bentuk umum dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat Orde Baru berkuasa. (1) Masih cukup populernya praktek represi politik oleh aparat negara, sekalipun intensitasnya belakangan ini mengalami kecenderungan menyurut. Kasus penanganan konflik-konflik politik —baik berbentuk demonstrasi protes, kerusuhan, serangan bersenjata maupun pembunuhan dengan alasan-alasan politik— dapat menjadi contoh, seperti, penanganan tanjung priok, Sampit, Poso dan lain sebagainya memperlihatkan bagaimana represi masih menjadi alternatif tindakan yang populer di kalangan aparaturnya. Masih tersisanya praktek represi hingga kini, dimungkinkan dengan masih dipertahankannya pendekatan keamanan dan belum terwujudnya penggunaan pendekatan kesejahteraan secara bermakna.

Penggunaan Undang-undang anti subversi secara amat longgar, leluasa dan lentur serta tergantung pada penafsiran dan kepentingan negara, merupakan contoh pelanggaran HAM dalam bentuk represi politik. Hal ini juga merefleksikan masih kurang akomodatifnya institusi hukum dan peradilan bagi upaya penegakan HAM. (2)

²² Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru, Masalah dan masa depan*

Praktek pembatasan partisipasi politik atau yang dikenal dengan depolitisasi. Praktek ini merupakan bentuk pelanggaran HAM karena cenderung mengingkari hak yang dimiliki warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Depolitisasi mahasiswa, kebijakan monoloyalitas birokrasi dan kebijakan massa mengambang merupakan beberapa contoh yang dapat di sebut.

(3) Praktek eksploitasi ekonomi beserta implikasi sosialnya merupakan pelanggaran HAM yang masih kerap kita temui di tengah masyarakat. Baik eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang telah diorganisir dan terlembaga seperti negara, perusahaan nasional dan multinaional, maupun eksploitasi yang tidak terorganisir, tidak terlembaga dan biasanya tertutup. Persoalan di seputar masalah perburuhan merupakan bentuk paling memprihatinkan dari pelanggaran HAM melalui cara eksploitasi ekonomi.²³

Ketiga bentuk umum tersebut memenuhi implikasi luas terhadap keseluruhan praktek pelaksanaan HAM selama Orde Baru dan pada gilirannya melahirkan pula bentuk-bentuk pelanggaran yang lebih spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih dalam keadaan memprihatinkan. Selain karena terkondisikan secara struktural oleh kebijakan pembangunan Orde Baru yang khas, hal ini juga ditopang oleh sikap kultural masyarakat terhadap penegakan HAM.

Maka dari itu ada kecenderungan dalam masyarakat yang kurang mendukung tegaknya HAM, yaitu masyarakat memiliki kecenderungan untuk bersikap pasif terhadap pelanggaran HAM, sekalipun hal itu menimpa mereka dan sekalipun

demokrasi Terpimpin Konstitusional, (Bandung: PT. RosdaKarya , 2000) 96.

masyarakat mengetahui benar bahwa berbagai pelanggaran HAM dilakukan oleh dan melalui aparaturnya. Namun ketika mereka mengalami ancaman pelanggaran, mereka mencari perlindungan terhadap pelanggaran tersebut kepada aparaturnya. Untuk itu kedua kecenderungan itu mengkonstruksi sebuah kenyataan bahwa ketidaktegakan HAM dikonstruksi oleh dominasi negara secara struktural dan penerimaan kultural masyarakat atas dominasi itu.

Indonesia kerap kali terjadi eskalasi kekerasan politik, baik yang berbasis massa maupun berbasis negara melalui aparaturnya yang terjadi pasca Orde Baru. Hal ini ditandai, *yang pertama*, bahwa Bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa yang kikuk dan gagap menghadapi perubahan yang sangat dramatis di segala bidang, termasuk bidang politik. Dari balik kegagalan dan kekikukan itulah muncul berbagai praktik yang tidak terkelola dan tidak terkendali. Salah satu wujudnya kekerasan itu.

Kekerasan dipandang sebagai ekspresi kegagalan masyarakat setelah sistem politik kehilangan pemegang kendali kekuasaan yang paling konkret dan penting yaitu Orde Baru. *Kedua*, kekerasan yang berkembang saat ini dipahamkan sebagai masalah struktural yang memiliki akar yang dalam sebagai sesuatu yang mensejarah; diproduksi oleh distorsi-distorsi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang panjang di masa lampau. Dengan demikian, kekerasan yang dipahami sebagai semacam kontinuitas bukan diskontinuitas dari suasana dan karakter sistem Orde Baru.

²³ Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru...*103.

Kekerasan bagaikan bom waktu yang meledak setelah sekian lama di tanam di bawah permukaan sosio-ekonomi-politik. Ketika bom-bom waktu tersebut meledak yang muncul adalah karakter primitif dan asli dari sistem – yang sangat akrab dengan kekerasan- tampil ke atas permukaan. Dari sini terlihat bahwa kekerasan adalah bukan ekspresi sesaat atas situasi sesaat melainkan gejala yang menyebar dan berakar sangat dalam.

Dalam sejarah kekerasan di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan massa ternyata merupakan artikulasi dari kemarahan massa atas kepengapan sosial, ekonomi, politik yang sudah mereka rasakan sejak lama sebelum berperan sangat signifikan dalam mendorong terjadinya kekerasan berbasis massa. Kekerasan berbasis massa ini sering kali dimanfaatkan demi egoisme politik elit tertentu.

Di sinilah kemudian muncul kritik yang semakin keras atas perangai mementingkan diri sendiri dan egoistis yang ditampilkan partai-partai politik. Dan pada titik seperti ini lahirlah pertanyaan sangat serius mengenai kemampuan *political society* sebagai lokomotif untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Tingkah laku super partisan dan penuh dengan *interest* partikular yang ditujukan oleh wakil-wakil partai serta sengketa horizontal yang semakin meluas antar pendukung dan elit partai politik di berbagai daerah menyadarkan banyak orang bahwa *political society*, belum tentu merupakan jawaban atas persoalan-persoalan Indonesia. Ia justru menjadi sumber persoalan baru atau semakin memperburuk persoalan yang sedang dihadapi.

Political society yang merupakan arena dan sekaligus bergulat dengan persoalan di sekitar kekuasaan (dan karenanya di dalamnya terdapat aktor-aktor semisal negara, birokrasi, partai politik, parlemen dan sebagainya) di junjung oleh kebanyakan masyarakat sebagai solusi terbaik bagi Indonesia untuk membangun demokrasi. Hal ini terungkap dengan sangat baik dari dukungan, baik pada tingkat wacana maupun politik, yang diberikan berbagai segmen masyarakat terhadap lahirnya partai politik yang sedemikian banyaknya.

Demikian pula, harapan yang sangat besar diungkapkan lewat pencapaian konsensus yang relatif muda di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat mengenai urgensi pemilu sebagai solusi bagi empat pertanyaan besar yang dihadapi bangsa. Pertanyaan besar itu semisal krisis multi-dimensi yang di hadapi, legitimasi rezim yang rendah, tertib sosial yang merosot, demokrasi yang terpuruk, kesemuanya di andaikan akan bisa disudahi melalui mekanisme politik yang disebut sebagai pemilu sejauh prinsip-prinsip jujur dan adil diperlukan.

Pencapaian "konsensus" di antara elit dan kelompok-kelompok yang signifikan secara politik mengenai pemilu sebagai instrumen sekaligus prosedur politik paling absah dan demokratis untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan sekaligus guna memunculkan sebuah pemerintahan yang absah mengungkapkan pengakuan yang sangat luas mengenai kedigdayaan *political society* sebagai kekuatan pokok yang memiliki kapasitas untuk menuntaskan persoalan-persoalan besar bangsa. Konsensus semacam ini memberikan hak moral dan politik utama kepada partai politik, pemilu dan parlemen sebagai agen-agen utama dalam proses politik.

Akan tetapi seiring dengan bergulirnya waktu, harapan-harapan besar di atas bisa memudar. Gagasan-gagasan kontra pemilu dan anti partai politik mulai bermunculan, sekalipun masih bersifat sporadis dan terbatas pada sejumlah segmen daerah tertentu. Gagasan-gagasan liar di atas di luar paradigma yang menekankan pada kemampuan pemilu atau pun potensi “pasar” sebagai instrumen dan prosedur politik guna membangun demokrasi.

Pada era Orde Baru muncul adanya proses restrukturisasi politik, ekonomi dan sosial mendasar yang membawa dampak-dampak tersendiri bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Pada dataran sosial, ekonomi ekselerasi pembangunan lewat pertumbuhan industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang di tandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris. Kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, utamanya terbentuknya kelas menengah yang ada di wilayah urban. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan anggota masyarakat, maka tuntutan akan perbaikan kualitas kehidupan pun menjadi semakin tinggi.

Pada dataran politik, Orde Baru melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini tentu saja harus dibayar dengan merosotnya kemandirian dan partisipasi politik anggota masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Akibatnya, kondisis *civil society* dan pertumbuhan dibawa Orde Baru menampilkan

berbagai paradoks, misalnya, dengan semakin berkembangnya kelas menengah ia seharusnya semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis Barat.

Namun tidak demikian kenyataannya. Kelas menengah yang tumbuh ternyata memiliki ciri yang berbeda dengan yang tumbuh di Barat akibat proses modernisasi, yakni adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara. Hal ini terutama pada kelas kapitalis Indonesia yang berkembang melalui pendekatan dengan negara dan elit penguasa. Apa yang di kenal sebagai *ersatz capitalism* (kapitalisme semu) di Indonesia adalah perwujudan yang membedakannya dengan kelas kapitalis di Barat.²⁴

D. Kondisi Sosial Keagamaan di Indonesia

Realitas sosial keagamaan di Indonesia sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia yang terkenal akan sopan santun dan keramah tamahan serta yang saling menghormati dan menghargai orang lain walaupun itu berbeda, baik agama, ras, suku, kulit dan sebagainya yang selama ini terdengar diseluruh masyarakat dunia hanya retorika saja. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya masyarakat Indonesia telah dilanda konflik.

Terutama konflik yang berbuntut pada kerusuhan sosial, umumnya merupakan korelasi (saling berhubungan) dengan berbagai konflik seperti konflik agama berkolerasi dengan konflik etnis, dengan konflik ekonomi, mobilitas migrasi (penduduk pendatang), politik atau yang lain. Hampir tidak ada kerusuhan yang di

²⁴Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES,1999) 5.

picu oleh konflik tunggal. Hanya saja konflik agama selalu muncul dalam kebanyakan peristiwa kerusuhan. Ini wajar, karena masalah agama memiliki sensitifitas yang sangat tinggi, menyangkut keyakinan seseorang yang amat dalam dan bersifat transendental dalam diri seseorang. Maka sering terjadi pula dengan suatu konflik non agama bisa menjadi lebih terbuka, lalu (oleh provokator tentunya) dicari carikan legitimasi agama. Dengan jalan itu konflik non agama akan bisa terkoreksi dengan konflik agama, sehingga terbuka kemungkinan akan meledak menjadi kerusuhan sosial.

Konflik antar umat beragama terutama hubungan Islam dengan Kristen memiliki sejarah yang sangat panjang baik di Indonesia maupun di dunia. Konflik agama hampir mewarnai semua peristiwa kerusuhan antar pemeluk agama di Indonesia. Indikasinya bisa dilihat dalam peristiwa itu selalu ada perusakan atau pembakaran tempat-tempat ibadah baik gereja, masjid, klenteng, vihara, maupun kuil. Hanya yang terbanyak dan terberat dalam perusakan dan pembakaran itu adalah gereja dan masjid.

Melihat berbagai kerusuhan yang ada di berbagai daerah, seolah-clah agama menjadi pemicu di dalamnya, tak bisa tidak kita mengelus dada dan bertanya kembali pada diri sendiri: dimanakah “mitos” yang dibanggabanggakan oleh birokrat Orde Baru dulu atas penduduk negeri ini sebagai bangsa yang moderat, mendahulukan harmoni dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan; bangsa yang sering dibanggakan ke panggung internasional sebagai “eksemplar yang patut dicontoh” bagi hubungan antar-umat beragama.



Kerukunan agama yang dibanggabangkan sesungguhnya adalah semu karena: *pertama*, apa yang dinamakan hidup rukun adalah superfisial yang ada di permukaan tetapi kosong di dalam. Kerukunan menyerupai pohon beringin besar yang “angker” seolah-olah teduh dan hijau, rimbun, memberikan rasa aman, tetapi sesungguhnya pohon itu mengalami pengeroposan dari dalam secara pelan-pelan hingga pada saatnya tiba pohon itu tumbang.

Apa yang disebut sebagai “kerukunan hidup umat beragama” kemarin itu tak lebih merupakan salah satu manifestasi saja dari stabilitas politik semu yang berhasil diteguhkan secara paksa melalui penggunaan instrumen kekerasan yang eksekutif di satu pihak, dan penciptaan rasa takut massal lewat konstruksi momen-momen traumatis sejarah bangsa di pihak lain. Kerukunan itu tak bisa tidak adalah semu belaka. Ia telah megecoh kita berkali-kali: kerusuhan di Situbondo, Sampit, Maluku, Aceh, Poso, dan lain sebagainya.

Kedua, kerukunan yang dibangun di tengah-tengah suatu sistem politik yang otoriter dan represif; kerukunan itu bukan lahir melalui suatu proses politik terbuka, bukan muncul dari negosiasi antar kelompok yang diatur melalui “aturan main” yang fair. Akibatnya kita mau rukun merasa was-was jika berbuat sebaliknya, kita akan memperoleh kerukunan fisik yang berat.

Ini mirip keadaan sebuah keluarga dengan figur seorang ayah yang angker dan galak: anak-anak begitu patuh dan menurut pada saat figur ayah itu ada di tengah-tengah mereka; satu menit ayah itu berlalu dari ruangan maka ributlah mereka itu. Tambahan pula karena kerukunan itu diciptakan secara paksa melalui sistem politik

yang otoriter, banyak masalah yang menjadi masalah atas kerukunan itu tidak pernah diselesaikan secara terbuka, tetapi disimpan terus menerus di bawah karpet. Tak heran jika dalam keadaan yang demikian itu kerukunan ada dipermukaan tetap menyimpan bahan peledak di baliknya. Ibarat barang pecah belah kerukunan kita di jaman Orde Baru itu getas sekali; sekali terkena benturan akan pecah berkeping keping.

Ketiga, kerukunan beragama yang kita miliki selama ini dibangun di tengah-tengah ketidakadilan distribusi aset nasional. Diukur dengan parameter apapun kerukunan yang ditegaskan atas disintegrasi sosial yang mencolok jelas tidak bisa diterima oleh siapapun; sebaliknya malah mencederai rasa keadilan publik. Kita malah bisa mengatakan bahwa kerukunan yang demikian itu merupakan trik atau kiat saja.

Kiat itu yang digunakan oleh pihak yang menikmati privilese sosial politik untuk mendiamkan ketidakadilan dan dengan demikian juga sekaligus melanggengkannya. Harus disadari oleh semua pihak, bahwa menghadapi situasi heterogenitas yang begitu kompleks, maka dituntut untuk memiliki kepekaan yang lembut untuk menangkap rasa keadilan masyarakat yang tidak seluruhnya bisa dikatakan sebagai bahasa politik yang vulgar²⁵

E. Relevansi Praksis Sosial Freire Dengan Teologi Pembebasan

Praksis sosial Freire memiliki relevansi yang sangat erat dengan Teologi Pembebasan. Sementara wacana Teologi pembebasan sendiri, saat ini masih merupakan wacana pinggiran dan jauh untuk menjadi gerakan nyata, terutama dalam lingkungan umat Islam. Justru wacana yang sering dipersoalkan adalah wacana tentang penegakan Hak asasi Manusia yang menjadi maenstrem dalam pemikiran sosial politik dan keagamaan kita dewasa ini.

Ada banyak sekali anggapan spekulatif tentang teologi pembebasan atau teologi untuk kaum tertindas menjadi wacana pinggiran bagi umat Islam terutama di Indonesia. *Pertama*, ada stigmatisasi politik terhadap aliran pemikiran 'kiri' yang membuat momentum sosial politik umat Islam saat ini lebih cenderung menerima paradigma demokrasi dan HAM yang notabene individualistik ketimbang paradigma sosialisme yang berpihak. *Kedua*, arus pemikiran teologi tradisional yang memihak pada kekuasaan, belum sepenuhnya mengalami penafsiran ulang. Kalangan teolog lebih cenderung mereproduksi pemikiran-pemikiran teologi yang mapan, ketimbang melakukan kritik yang sistematis.

Teologi Pembebasan adalah istilah yang diciptakan pada pertengahan awal abad yang lalu untuk mengemban upaya yang dilakukan kalangan teolog Amerika Latin untuk membuat ajaran gereja relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh Masyarakat Amerika Latin. Perhatian dan kepedulian pokok teologi pembebasan adalah pembebasan kaum miskin dan tertindas, dengan

²⁵ Ulil Abshar Abdallah, *Membakar Rumah Tuhan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,

menafsirkan ajaran-ajaran gereja untuk menjadi relevan, menyegarkan, dan membebaskan rakyat yang tertindas. Model inilah yang kemudian diikuti oleh teolog-teolog pembebasan dari negara-negara lain.

Teologi pembebasan juga tidak saja berkembang di lingkungan gereja, tetapi juga di kalangan Muslim; seperti Ashghar Ali Engineer dengan istilahnya 'teologi Pembebasan', dan teolog-teolog lain seperti Hasan Hanafi, Farid Essack, Ziaul Haque, dan lain-lain. Para pemikir Islam tersebut mempunyai konsep untuk mengga-i kembali nilai-nilai revolusioner dalam teologi Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist. Analisisnya yang ditandai dengan berbagai keprihatinan.

Pertama, Teologi Islam yang saat ini berkembang di masyarakat Muslim telah kehilangan relevansinya dengan konteks sosial yang ada. Padahal teologi Islam yang sebenarnya sungguh sangat dekat dengan masalah-masalah keadilan, sosial, ekonomi.

Kedua, keharusan mengembalikan komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan, sosio-ekonomi dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dipinggirkan. Salah satu aspek dalam teologi Pembebasan adalah mengeksploitasi hakekat Allah, Universalitas dan Cintanya kepada semua rakyat dan individu-individu dan menegaskan basis teologis untuk menolong segala bentuk rasisme dan diskriminasi tanpa pengecualian. Dalam pandangan ini Allah berada pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan.

Keprihatinan teologi pembebasan jelas diarahkan kepada rakyat miskin yang termaljinakan dan membela kepentingan mereka dengan 'senjata teologis' untuk melawan golongan dan struktur yang menindasnya. Praksis Teologis yang membebaskan mengandaikan keterlibatan teologi dalam situasi konkrit kehidupan rakyat, mengenali penderitaan hidup mereka dalam sistem kapitalisme yang menindas serta berjuang bersama-sama mereka yang melawan struktur sosial yang tidak adil.

Penderitaan rakyat akibat ketimpangan sosial-ekonomi memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh prinsip perdamaian dan non kekerasan telah menjadi prinsip utama. Jalan revolusi damai maupun perjuangan konstitusional menjadi suatu sarana pembebasan, sehingga rakyat melihat keyakinan mereka sebagai sumber keberanian dan kekuatan dan pandangan bagi masa depan lebih baik.

Dalam kaitan dengan Teologi Pembebasan atau Teologi untuk Kaum tertindas ada empat rumusan dalam Islam yang dijadikan landasan dasar. *Pertama, tawhid* yang berarti tidak hanya berfokus pada persoalan ke-Esaan Tuhan. Tetapi lebih ditekankan pada "ke-Esaan Manusia", dalam pengertian menolak setiap bentuk diskriminasi, perbedaan dan mencita-citakan masyarakat tanpa kelas.

Kedua, Kufr yang tidak berarti 'mereka yang tidak percaya kepada Tuhan', tetapi juga yang meliputi mereka yang mempertahankan status quo, yakni mereka yang secara aktif melawan setiap upaya perubahan struktur masyarakat yang berpusat pada harta, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan sosial lainnya.²⁶

²⁶ *Ulumul Qur'an* No.3, Vol, VI, tahun 1995.

Sedang *ketiga*, untuk doktrin *keadilan sosial* adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak eksploitatif. Sistem ekonomi ini kemudian diterjemahkan dengan menciptakan sistem ekonomi yang non kapitalistik. Penguasaan sarana produksi diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi alat penindasan dan pemotongan nilai lebih terhadap mereka yang tidak mempunya. Selain itu, tercapat semangat yang tinggi untuk meletakkan prinsip hubungan sosial yang tidak berdasar pada pemilikan mutlak, tetapi lebih berdasar pada prinsip ketenagakerjaan.

Untuk persoalan doktrin pembebasan adalah suatu ajakan kepada kaum Muslim untuk menegakkan pembebasan dan melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan. Persoalan penindasan dilihat sebagai persoalan dalam umat Islam sendiri, bukan persoalan hubungan antara kaum Muslim dengan dengan umat agama lain. *Concern* teologi untuk kaum tertindas justru tertuju pada persoalan hubungan antara masyarakat Islam yang mendominasi ekonomi dengan masyarakat Islam yang tidak punya.

Keprihatinan Teologi kaum tertindas adalah menciptakan suatu kelompok masyarakat yang berkesadaran kritis terhadap struktur penindasan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta mengupayakan secara sadar pembebasan dalam bentuk menciptakan organisasi masyarakat. Dalam skala yang lebih makro turut berjuang untuk mengakhiri segenap bentuk penindasan politik dan ekonomi dalam suatu hubungan ketidakadilan struktur ekonomi imperialisme internasional.

Terakhir *Keempat*, *Doktrin Pembebasan*. Doktrin ini merupakan konkritisasi dari proses refleksi kritis atas realitas di satu sisi dan di atas elan vital Islam sebagai

agama pembebas di sisi lain. Proses reflektif secara kritis terhadap keduanya bermuara pada satu titik: spiritualitas pembebasan. Spiritualitas ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk terus menerus melakukan pembebasan. Pada struktur sistem (sosial, ekonomi, politik) yang menindas, eksploitatif dan mempertahankan ketidakadilan, tetapi juga diarahkan terus menerus pada upaya membebaskan manusia dari hegemoni wacana tertentu, dalam hal ini bisa berupa teks-teks suci (Al-Qur'an dan sunnah), produk-produk pemikiran keagamaan maupun bukan yang mungkin telah terbakukan dalam suatu *mainstream*.

Untuk itu, pemikiran kontra wacana secara kritis selalau dikehendaki untuk menghindarkan manusia dari keterbelengguan wacana tertentu yang bisa mendistorsi kebebasan. Manusia secara entitas yang bebas dan membebaskan. Pemahaman atas suatu wacana (baca: teks-teks suci agama misalnya) harus senantiasa dilakukan secara kritis dalam kerangka kontekstualisasi.

Alhasil, dekonstruksi, rekonstruksi, reformulasi atau apapun namanya harus selalu dilakukan. Tanpa harus terjebak dalam nihilisme, kebenaran (mutlak) harus dianggap tidak ada, dan yang ada hanyalah kebenaran-kebenaran. Ada relativitas kebenaran, akhirnya secara teologis hanya kebenaran Tuhan memang mutlak adanya, tetapi ketika ia diturunkan kepada manusia (dalam bentuk wahyu: teks) maka seketika itu pula ia berubah menjadi kebenaran-kebenaran.

Di sini spiritualitas pembebasan mengemuka ketika kebenaran Tuhan (yang diwakili teks suci; Al-Qur'an) itu didialogkan dengan realitas manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian spiritualitas pembebasan (harus) senantiasa

mengambil tempat dalam proses kontekstualisasi teks atas konteks. Substansi teologi pembebasan yang demikian, sebagaimana diuraikan di atas, memiliki relevansi yang sangat erat dengan praksis sosial Freire yang menghendaki dihilangkannya dominasi dan struktur sosial yang menindas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA PRAKSIS SOSIAL PEMBEBASAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah memahami bahwa pemikiran Paulo Freire merupakan pemikiran yang selalu mencerminkan nada gugatan, protes, dan berontak terhadap segala bentuk penindasan yang telah menceraibut manusia dari kesadarannya. Freire bersama para pendahulunya (Hegel dan Marx) berpikiran bahwa refleksi dan aksi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Betapa berpengaruhnya tiap kehidupan dan tiap pekerjaan serta pengalaman dari keluarga dan orang-orang yang bekerja dengannya terhadap warna pemikiran Freire.

Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran Freire selalu muncul dari realitas hidup dan pengalaman keseharian dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga wajar jika ia berpikiran, bahwa segala bentuk refleksi yang ia lakukan selalu berdasarkan realitas dan upaya mewujudkan secara praksis. Dalam kehidupan yang sekarang ini, langka sekali orang yang memiliki kepribadian seperti Freire. Dia menjelma menjadi sosok yang memiliki sifat-sifat kepribadian radikal, utopis, dapat diraih, serta kritis yang menggambarkan dirinya benar-benar berasal dari sikap optimismenya tentang manusia, yang dipandanginya sebagai sosok yang mampu menjadikan dirinya berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki tanpa mengabaikan sendi dasar kemanusiannya.

Latar belakang kehidupan freire dengan cengkeraman kemiskinan yang melanda negaranya (Brazil) di mana ia hidup dalam budaya penindasan dan kebudayaan bisu

serta pengalaman hidupnya yang akrab dengan kemiskinan dan kelaparan mendorongnya untuk berjanji akan bekerja di antara kaum miskin dan mencoba memperbaiki nasib hidup mereka. Ia berkeyakinan bahwa kelak semua laki-laki dan perempuan dapat sungguh-sungguh menjadi manusiawi dan merdeka sebagaimana yang dikehendaki penciptanya.

Sikap optimismenya sebagai manusia yang merasa ditindas dan melihat realitas penindasan, meski dalam pemenjaraan dan pembuangan, kontroversial kepribadian dan revolusioner pemikirannya telah menjadikan dirinya sebagai pemimpin perjuangan kaum tertindas di dunia ketiga khususnya di Amerika Latin. Feire bukanlah sosok konseptor kosong terhadap makna filosofis terhadap setiap aksi pemikirannya. Ia lebih tampil sebagai sosok reflektor praksis, di mana setiap hasil pemikirannya langsung melalui eksperimentasi di lapangan dengan sandaran filsafatnya pada fakta sejarah yang sekian telah dialaminya sendiri.

Sisi lain yang unik dan khas dari Freire adalah kejujurannya dalam mengungkapkan dan mengatakan apa adanya tanpa tedeng aling-aling tentang kondisi kemanusiaan kita yang begitu memprihatinkan sehingga tanpa disadari kita sendiri sering berperilaku tak manusiawi. Pemikirannya yang selalu menohok pada inti permasalahan dengan pemikiran filsafat yang *shopiscated* ke dalam aplikasi persoalan-persoalan kehidupan keseharian, telah menjadikannya tidak berhenti pada persoalan terminologis yang bergerak di atas permukaan persoalan.

Namun dengan metode refleksi-aksinya ia telah menjadikan pemikirannya bumi dan membawa perubahan besar dalam menjawab persoalan kemanusiaan

dunia ketiga. Yang dimaksud Freire dengan pendidikan untuk pembebasan adalah membuat mereka yang tertindas (istilah yang digunakan Freire) atau terkungkung suatu keadaan, merdeka, mandiri, tak terikat dalam keadaan yang mendominasi dirinya. Atau lebih jelasnya, kaum tertindas itu bisa meloloskan dirinya dari dominasi itu. Sedangkan mereka yang menindas atau yang mendominasi suasana, dalam proses “pendidikan untuk pembebasan” itu belajar berdialog dengan kaum tertindas.

Freire melihat adanya kebutuhan pendidikan bagi kaum tertindas. Ide ini muncul ketika Freire melihat kaum miskin (kaum tertindas) tidak dapat menggunakan hak suara dalam pemilu karena kaum tersebut buta aksara. Inisiatif untuk pembebasan harus datang dari kaum tertindas yang mengami beban penindasan dan juga mampu memahami makna penindasan yang mengerikan. Pendidikan kaum tertindas merupakan perjuangan melawan penindasan dalam konteks interaksi dunia dan manusia, serta proses berkelanjutan praksis refleksi dan aksi. Faktor penting dalam gerakan pendidikan dan pembebasan adalah perkembangan kesadaran (*conscientization*).

Dalam pandangan penulis ada beberapa analisis pemikiran Freire. *Pertama*, mengenai Personalitas bahwa dalam perkembangan intelektualnya, Freire membaca karya Emanuel Mounier. Dalam filsafatnya Freire mengemukakan bahwa sejarah telah mendorong ke arah perbaikan dan pembebasan umat manusia, di samping itu juga sejarah mempunyai arti salah satunya perang dan bencana yang lain. Untuk itu teknologi dan ilmu pengetahuan adalah perkembangan-perkembangan yang menggembirakan dalam gerak sejarah menuju kemajuan, dan bahwa manusia

nempunyai misi yang mulia, yakni menjadi agen bagi pembebasannya sendiri. Agar terhindar dari tindakan cultural yang mendomestikasi, manusia harus terlibat dalam realitas utopia yang baru.

Dalam hal ini personalisme bukanlah suatu sistem politik. Ia adalah sebuah perspektif, suatu cara pandang terhadap dunia yang optimis dan sebuah seruan untuk bertindak yang merupakan karakter pemikiran Freire yang tak terhapuskan. Dalam mendesakny kebutuhan dalam kepentingan sosial di dunia ketiga, Freire menanggapi bahwa memasukkan dan mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan secara besar-besaran dari dunia pertama melalui metode pendidikan yang mengabaikan kesadaran penduduk marginal, dapat menjadi tidak manusiawi dan sama menindasnya dengan rezim yang menekan rakyatnya dengan cara lain.

Kedua, Eksistensialisme, dalam persoalan seperti ini pemikiran Freire ada kemiripan dengan Sartre, Jaspers, Marcel, Camus, Heidegger dan filosof lain. Penekanan Freire pada eksistensialisme terletak pada kebebasan manusia untuk memilih dan bertindak mengambil bentuk dalam diri para pengarang yang menghilangkan mitos atas alasan-alasan mengapa seseorang atau suatu masyarakat memilih tujuan-tujuan, nilai-nilai struktur ekonomi dan bentuk pemerintahan tertentu. Metodologi Freire maju lewat diskusi-diskusi tentang alasan mengapa orang merasa terbatasi dalam pilihan-pilihan mereka atau mengapa mereka berfikir tentang diri mereka sebagai manusia untuk orang lain bukannya diri mereka sebagai manusia bebas untuk diri mereka sendiri. Di atas semua itu, penekanan Freire pada dialog sebagai alat yang penting dalam metodologinya dan sebagai kriteria penghakiman

tingkat di mana penindasan dan keterbukaan melambangkan struktur politik yang ada, membuktikan betapa besar Freire menjunjung intersubektivitas.

Ajakannya yang terus menerus untuk mengadakan dialog dengan kaum tertindas mengundang banyak kecaman dari golongan revolusioner yang tidak akan ragu-ragu memaksa solusi dan rencana mereka untuk memerdekakan orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Freire mencatat bahwa dialog Socrates yang dicontohkan dalam pemikiran Plato bukanlah jenis dialog yang digunakan manusia untuk terlibat dalam tindakan cultural. Plato dan Socrates menggunakan dialog sebagai sesuatu yang dengannya manusia diarahkan untuk menemukan gagasan-gagasan yang telah lama dilupakan. Sedangkan dialog Freire adalah refleksi atas hubungan manusia-dunia dan bertolak dari penemuan eksistensi manusia di dalam dan dengan dunia. Freire menuntut orang yang berdialog harus dengan peruh kasih. Obyek kasih manusia adalah dunia, manusia harus mengasihinya diri mereka sendiri, hidup dan orang lain.

Kasih ditandai pada komitmen pada manusia lain dan dunia, dan komitmen itu tampak dalam kepercayaan dan keyakinan pada kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengarahkan sejarah. Dialog menuntut manusia untuk bersikap tulus saat mereka mencoba mengetahui bersama-sama, karena dialog terancam dan menjadi tidak mungkin saat manusia menganggap orang lain sepenuhnya bodoh atau membahayakan dialog dengan tidak menyadari kebodohnya sendiri dan gagal melihat bahwa ia butuh mencari pengetahuan bersama orang lain. Freire sadar akan kemewahan retorik kata-kata, kasih, kepercayaan, komitmen, iman, persaudaraan,

solidaritas bahkan dialog. Pada saat yang sama ia didorong oleh suatu kebutuhan konsistensi dan epistemologinya yang menggambarkan pengetahuan sebagai sosial, tergantung pada intersubyektifitas.

Penulis yakin akan lebih mudah bagi Freire untuk bergabung dengan barisan kaum revolusioner ateis dari pada tetap bergabung dengan gereja Katolik dan dewan gereja dunia. Kenyataan bahwa ia seorang penganut Katolik, lebih Kristen dari semuanya yang menutup mata terhadap ketidakadilan sosial, membuktikan kebohongan pada mereka yang percaya bahwa optimismenya semata-mata berdasarkan politik. Dia tidak pernah putus harapan dan berhenti mencari.

Ketiga, Fenomenologi, dalam istilah konsientisasi yang ada dalam pandangan Freire terletak pada keadaan kesadaran manusia sering membuat dirinya dituduh sebagai seorang idealis, seorang pemimpin yang ingin merubah realitas sosial dengan perubahan sederhana pada kesadaran manusia. wajar jika bagi Freire kebutuhan refleksi atas kesadaran seseorang dan kesadaran kelompok merupakan sisi istimewa dari pemikiran metodologi Freire. Namun perhatiannya pada kesadaran lebih utama dibandingkan keinginan untuk merubah kesadaran orang lain. Dari metode fenomenologis Husserl, dia mengadopsi prinsip bahwa eksplorasi kesadaran adalah prasyarat untuk mengetahui realita. Husserl juga menganggap bahwa kesadaran mampu memantulkan dirinya sendiri agar dapat mengetahui strukturnya sendiri, kesadaran diri. Freire menggunakan investigasi realita dan kesadaran fenomenologis untuk menyingkap cara mengetahui manusia.

Keempat, Marxisme. Freire adalah seorang Amerika Latin, dan perbedaan di sana antara yang miskin dan kaya, antara yang berkuasa dan yang tidak punya kuasa, menimbulkan kesulitan untuk memandang hidup sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perjuangan untuk sisi kemanusiaan yang lebih besar. Apapun kelemahan karena terlalu menyederhanakan sejarah, ekonomi dan sosiologi dalam karya Marx dan para pemikir sosialis setelahnya yang sering di kutip oleh Freire, pemikiran yang dialektis didorong dan dirangsang dalam suatu lingkungan di mana perbedaan nampak semakin jelas.

Bagi Freire jika rakyat diberi kebebasan, maka mereka dapat membangun sistem politik yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Praksis sosial harus diarahkan pada tindakan politik, namun Freire enggan mengatakan bentuk tindakan apa yang harus diambil di balik sosialisme yang samar. Freire memberikan kontribusi pemikirannya melalui tiga penekanan pada filsafatnya yaitu: (1) Penindasan. (2) Ketergantungan terhadap bekas penjajah dalam keputusan-keputusan politik, dan ekonomi dan berkelanjutan. (3) Orang-orang yang tersisih yang membentuk budaya diam.

Di Indonesia sendiri, pemikiran Paulo Freire sangat menarik untuk digunakan sebagai pisau bedah atas berbagai persoalan multidimensi saat ini. Karena Indonesia saat ini merupakan cerminan dari bangsa yang ringkih (*fragile*), mirip barang pecah-belah. Indonesia saat ini sedang berada di tepian tebing yang setiap saat siap menghancurkan eksistensinya. Dalam keanekaragamannya ternyata malah mengandung potensi konflik yang mengancam kelangsungannya sebagai bangsa

manusia yang beradab. Barbarisme, atau penindasan kemanusiaan dalam bahasa Freire, senantiasa datang mengendap-endap membawa teror di balik jubah perbedaan agama, etnis, provinsi, bahkan golongan politik. Elite-elite politik bahkan saling cakar demi rebutan roti kekuasaan yang semakin membuat rakyat terpuruk dalam penindasan tanpa daya kekuatan.

Apa yang tengah terjadi di Indonesia sekarang tak jauh beda dengan sebuah kapal besar yang pecah dan siap tenggelam di dasar samudra. Di ruang kemudi terjadi kekacauan yang memperebutkan posisi di pucuk kekuasaan. Sementara kondisi ekonomi rakyat semakin terpuruk, politik tak karuan dan agenda-agenda reformasi kandas di telan kepentingan berbagai gerombolan elite. Sehingga sempurnalah penderitaan rakyat akibat proses penindasan dan dehumanisasi negeri ini; kehidupan rakyat yang semakin terkepung krisis dari segala sudut, dan bangsa ini sedang memproses kehancurannya sendiri.

Memang benar bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase transisi yakni fase reformasi sebagai koreksi tambal sulam terhadap praktek perekonomian Orde baru yang kroni-kapitalistik dan praktek politik yang otoritarian dan pasti a-demokratik. Benar pula bila koreksi atas Indonesia sekarang belumlah lepas dari kerangka ideologi kapitalisme yang menjadi akar dari segala akar penindasan di Indonesia. Bila pada tahun 1965 merupakan fase penetrasi kapitalisme tahap I, maka 1998 merupakan restorasi tahap II - dan akan menyusul kerusakan-kerusakan permanen sebagaimana watak kapitalisme yang senantiasa berdiri di atas api penindasan.

Indonesia memang sosok tanah-air yang maha besar, maha luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang banyak pula. Bisa dibayangkan, suatu ruang seluas kurang lebih dua juta km persegi, dengan hampan 13. 699 pulau dengan total penduduk 203, 46 juta jiwa. Di dalamnya hidup sekitar 495 rumpun bahasa dalam kelompok etnis dan 5 agama resmi plus puluhan aneka kepercayaan. Realitas ini mengandung dua potensi besar yang bisa diprediksikan yaitu relasi konflik akan terus mengoyak kehidupan masyarakat dengan segala perbedaannya atau ketentraman dan kedamaian bakal tercipta dengan adanya syarat fundamental; terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan demokrasi kerakyatan sebagai sistemnya.

Dalam pengertian yang lebih pendek, Indonesia saat ini menghadapi masalah barbarisme dan penindasan. Apa yang terjadi di atas pelataran Indonesia masa kini adalah cermin retak sebuah reformasi. Kegagalan proyek reformasi. Demokrasi yang dirancang menuju liberalisme dan ekonomi yang direstrukturisasi agar sepenuhnya kapitalistik lewat agenda neo-liberalisme yang sedang dirancang-bangun sedemikian rupa. Dalam rancangan besar, semua sistem yang saat ini dikerahkan untuk menjawab semua tantangan Indonesia kontemporer merupakan agenda revisi atas tatanan dan praktek ekonomi (kroni-kapitalistik) dan politik (otalitarian) Orde Baru yang penuh dosa.

Namun upaya apapun tampaklah kerapuhannya ketika *blue print* dan perkakas yang dipakai tetap menggunakan piranti kapitalisme dan liberalisme yang jelas-jelas memiliki watak yang menindas. Suatu sumber dari segala sumber lahirnya ratusan konflik dan malapetaka yang siap mengoyak soliditas integrasi nasional

Indonesia. Apa yang menimpa Indonesia hari ini adalah probem nasional dengan apa yang dideskripsikan Karl Marx sebagai *all that is solid melts into air* (semua yang kokoh, kini telah menguap ke udara). Apa yang dahulu tampak ‘dimapankan’ secara politik oleh rezim Orde Baru dalam bingkai integrasi nasional Indonesia, kini telah tercerai-berai oleh konflik agama, konflik antaretnis, antarkampung, antargolongan politik, elite contra elite, pusat versus daerah, dan konflik dalam skala besar kita bisa membaca tuntutan Aceh merdeka, Papua merdeka, dan Riau merdeka.

Gerakan separatis tampak nyata tengah mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami realitas ini, maka kita sama-sama harus mengelupas keaburan-keaburan yang acapkali memanipulasi pemahaman kita tentang suatu identitas konflik. Sebagai kata kunci pembahasan ini adalah kontradiksi, suatu istilah yang mengandung pengertian adanya sumber pertentangan yang material dan utama antara suatu kekuatan yang lemah melawan yang kuat, lebih tepatnya antara mayoritas yang dilemahkan, ditindas dan dihisap melawan minoritas yang kuat lagi menghisap dan penindas.

Kontradiksi ini mempunyai determinasi pada kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai sumber keadilan yang sejati. Apabila keadilan sejati ini terluka, maka koyak-moyaklah semua ikatan yang mengharmoniskan tatanan sosial, tanpa pandang suku, agama, etnis, ras, kelas maupun komunitas. Dengan demikian, akar dari segala akar kontradiksi sejatinya adalah penindasan dan ketidakadilan ekonomi. Konflik agama, suku, ras, etnis atau golongan menjadi faktor sekunder.

Di luar kondisi itu semua, daya perubahan tentu akan sangat tergantung pada sejauhmana kekuatan-kekuatan revolusioner di Indonesia melakukan konsolidasi untuk kemudian dikristalkan menjadi kekuatan politik yang mampu melakukan antitesis terhadap kondisi yang menindas dan eksploitatif ini. Dan di sinilah kerapuhan segera tampak. Bahwa dalam kekaburan politik nasional yang tampaknya semakin banyak dikacaukan oleh perilaku elite-elite politik ini, terdapat beberapa perdebatan menarik tentang di manakah posisi politik kaum Marxis, kaum yang banyak membawa bendera pemikiran Paulo Freire, yang anti terhadap segala bentuk penindasan? Dan apa yang harus dilakukan oleh elemen-elemen Freirean yang kebanyakan juga berhaluan Marxis di Indonesia?

Terdapat banyak jawaban sebanyak jumlah elemen gerakan yang terfragmentasi dalam berbagai kubu. Yang pasti kini terdapat kekecewaan yang didasarkan pada realitas objektif, betapa relatifnya kualitas sebuah kebebasan berideologi yang masih bersarang di alam mimpi, atau kebebasan berserikat bagi buruh yang pada kenyataannya banyak dijegal oleh preman dan organisasi-organisasi buruh reaksioner, sisa-sisa kekuatan Orde Baru, dan korupsi yang semakin tak terberantas, ekonomi yang bangkrut.

Inilah kenyataan objektif, di mana kenyataan tidak semanis yang dijanjikan oleh penguasa baru. Dan bagaimana fungsi pemerintahan semakin tak punya daya kekuatan untuk memberikan rasa keadilan yang konkret bagi rakyat, yang semakin menderita akibat praktik penindasan yang dilegalisasi melalui produk perundangan. Kondisi ini diperparah dengan pendekatan politik yang melulu merujuk pada

kekuatan elite yang tampaknya masih cukup dominan mewarnai perspektif kaum pergerakan di Indonesia. Padahal pendekatan semacam ini dalam perspektif Freire, sudah harus ditinggalkan karena usang dan mistik, yakni ketika suatu kekuatan perubahan tidak bersandar pada kekuatan pokok perubah itu sendiri maka ketergantungan ini bisa dikatakan avonturisme di kalangan para oportunist.

Sementara itu di kubu kiri lainnya berkembang sebuah analisis yang menyatakan bahwa, ada baiknya elemen kiri tidak terjebak dalam pro-kontra kekuasaan namun membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan besar yang berpengaruh. Dalam aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik besar ini - yang tentu sebagian besar diisi oleh kaum moderat dan konservatif ini - akan menguntungkan pihak kekuatan kiri.

Akan tetapi bila berkaca pada pilihan tindakan aliansi ini, maka akan didapati sosok kaum kiri yang kecil, minder, takut dan dicekam inferioritas dalam kekuatan. Kenyataan ini tentu sebuah kenaifan bila kita menganalisis dengan pisau Freire yang tajam dan ilmiah itu. Yakni bagaimana suatu elemen yang mengklaim kiri dan revolusioner namun pada kenyataannya sama rapuhnya dengan kaum moderat, tak bergigi dan kompromis sebab jangan-jangan memang tidak mempunyai basis massa konkret dalam konteks massa kelas tertindas yang tentu mayoritas secara kuantitas. Pilihan aliansi dengan kekuatan borjuasi nasionalis, memang tidak bisa berbuat banyak dalam pengertian aksi-aksi revolusioner yang melibatkan kelas buruh. Taktik ini pun juga sudah beberapa kali diuji dan terbukti gagal. Sebab kekuatan kiri yang berhaluan Freirian tentu akan selalu bersandar pada kekuatan riil di basis-basis kelas

buruh, buruh-tani, petani miskin, serta elemen lain yang telah teruji sepanjang sejarah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dengan demikian, bagi mereka segenap kaum pergerakan yang menggunakan pemikiran Freire sebagai kerangka berpikir dan membaca kondisi objektif, tentu akan senantiasa mempertautkan diri dengan massa rakyat dalam kelas-kelas tertindas. Bersama mereka segenap perspektif akan dipertaruhkan benar dan salahnya, taktik dan strategi akan dirancang ampuh dan tidaknya. Dan yang terpenting adalah bagaimana sebuah kekuatan kelas bisa 'dimainkan' dalam konstelasi politik nasional yang kacau ini, bersama program-program perjuangan yang akan memperjuangkan kepentingan kelas tertindas dan sekaligus memandu mereka menuju praksis sosial perubahan yang lebih sejati.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari diskripsi pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praksis sosial merupakan gerakan nyata berupa pemikiran sekaligus cerminan dari kehidupan nyata. Gerakan ini untuk membebaskan masyarakat atau kaum tertindas yang fitrahnya diinjak-injak, dikerdilkan lewat ketidakadilan, dieksploitasi, penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh penindas. Fitrah mereka sebagai manusia yang merdeka, mandiri, demokratis dan bebas menentukan nasibnya sendiri telah ditiadakan. Agar aksi sosial ini lebih bermakna maka kaum tertindas dalam mengusahakan, memperoleh kembali kemanusiaan mereka, jangan sampai berubah menjadi penindas kaum tertindas, melainkan mereka harus memanusiakan kembali keduanya.

2. Penindasan apapun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi). Untuk itu humanisasi merupakan satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan walaupun dehumanisasi adalah kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah peradapan manusia dan

tetap merupakan suatu keniscayaan ontologis dimasa mendatang. Meski pemanusiaan dan dehumanisasi merupakan alternatif, hanya pemanusiaan yang menjadi fitrah manusia.

3. Kondisi masyarakat Indonesia dengan masyarakat Brazil sama-sama mengalami penindasan. Sistem yang diterapkan lebih berorientasi pada kepentingan elit politik yang jauh dari kepentingan rakyat. Semangat masyarakat Indonesia untuk membebaskan dirinya dari ketertindasan merupakan bagian inspirasi dari pemikiran Paulo Freire.

B. SARAN-SARAN

Bahwa penelitian tentang pemikiran paulo Freire ini sangat menarik untuk terus dikaji dan digali. Mengingat adanya sumber inspirasi pembebasan yang tak habis-habisnya untuk ditimba. Di samping itu juga skripsi ini masih relevan bahkan harus dikembangkan Hal ini dapat mengisi kelangkaan buku (skripsi) serupa dalam khasanah pustaka kita, yaitu literatur pendampingan massa (pendidikan non formal) dengan konsep yang jelas dan bisa dijabarkan ke dalam sebuah metodologi yang mudah untuk dijalankan. Hanya literatur semacam ini yang akan menciptakan hubungan dialektis antara konsep dan praksis.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi: Pergolakan Ideologi di dunia LSM*. Terj. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lowy, Michael. 1991. *Teologi Pembebasan, dan Kritik Marxisme*. Terj. Roem Topatimasang. Jakarta: Sekolah rakyat Merdeka.

Subhan, Arif. 1995. *Teologi Yang Membebaskan, Kritik terhadap Developmentalisme*. Ulumul Qur'an 3. 100-3.

Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?*. Bandung: remaja Rosdakarya.

Hikam, AS Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Pengantar: Franz magnis-suseno. Jakarta: LP3ES.

Collins, Denis. 2002. *Paulo Freire Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*. Diterjemahkan dari *Paulo Freire His Life, works. And Thought*. Penerj. Henry Heyneardhi dan Anastasia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Smith, A William. 2001. *Constinzacau Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Penerj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Freire, Paulo. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Diterjemahkan dari *Pedagogy of the Oppressed*. Penerj. Mansour Fakih.dkk. Jakarta: LP3ES.

_____. 1999. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Diterje dari *The Politic of Education, Culture, Power and Liberation*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

_____. 2000. *Dialog Bareng Paulo Freire, Sekolah Kapitalisme yang Licik*. Miguel Escobar (ed). Penerj. Mundi Rahayu. Yogyakarta: LKiS.

Rizal, Sukma. 1995. *Hubungan Internasional dekade 1990-an Hegemoni, Dekonstruksi, dan Agenda*. Jurnal ilmu Politik 15. 3-20.

_____. 2001. *PostKolonialisme, Sikap kita terhadap Imperialisme*. Penynting: Muhidin M Dahlan. Yogyakarta: jendela.

_____. 1998. *Atas nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog Bebas konflik*. Ed. Andito. Bandung: PT. Pustaka Hidayat.

_____. 1999. *Indonesia dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSAF.

_____ 2001. *Seri Pendidikan Anti Diskriminasi*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa. Nomor 19. Minggu ketiga Maret.

_____ 1994. *Teologi Kaum Tertindas, dalam Spiritualitas Baru: Agama dan Inspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfideia.

Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gafar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susetyo, Pr Benny. 2001. *Orde Para Bandit*. Yogyakarta: LKiS.

Sudarto, H. 1999. *Konflik Islam Kristen*. Pengantar. Deliar Noer. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Gilbert, alan dan Gugler, Yosef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Terj. Anshori dan Juanda. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id